PERAN DINAS SOSIAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU DALAM PENGAWASAN PANTI SOSIAL DI KOTA PEKANBARU

Oleh:
Hendri Depisya
167322019

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
Bidang Kajian Utama Ilmu Pemerintahan

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : HendriDepisya
NPM : 167322019
Program Studi : IlmuPemerintahan
JudulTesis : **Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Jumat
Tanggal : 05 April 2019
Pukul : 09.00-10.00 WIB

Dan dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua **Sekretaris**

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si **Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si**

Anggota

Lilis Suriani, S.Sos, M.Si

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

PERAN DINAS SOSIAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU DALAM PENGAWASAN PANTI SOSIAL DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

Nama	: Hendri Depisya
NPM	: 167322019
Program Studi	: Magister Ilmu Pemerintahan
Kekhususan	: Ilmu Pemerintahan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan
Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Dosen Pembimbing untuk diseminarkan

Pembimbing I Tanggal 6 MARET 2019

(Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si)

Pembimbing II Tanggal 9-3-2019

(Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si)

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau

(Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 074/UIR/KPTS/PS-IP/2017
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
   a. Nomor : 85/M/1999
   b. Nomor : 102/M/2001
   c. Nomor : 228/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasonal R.I. :
   a. Nomor : 232/U/2000
   b. Nomor : 234/U/2000
   c. Nomor : 176/O/2001
5. Surat DirekturJenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
   a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
   b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010
   c. Nomor : 156/D/T/2007
   d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
   e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
   f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
   g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
   a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
   b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
1. Menunjuk :
   a. Nama : **Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.** sebagai **Pembimbing I**
   b. Nama : **Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si.** sebagai **Pembimbing II**

   Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :
   Nama : **HENDRI DEPISYA**
   N P M : **167322019**
   Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
   Judul Tesis : **"PERAN DINAS SOSIAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU DALAM PENGAWASAN PANTI SOSIAL DI KOTA PEKANBARU".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 19 Oktober 2017
Direktur,

Dr. Ir. Saiful Bahri, M.Ec.
NIP/NIK. 11.02.189

Tembusan : Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
5. Pertinggal *D:\SK_BIMBINGAN_doc_Benk*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hendri Depisya

Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 16 Desember 1994

NPM :167322019

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Alamat : Jl. Gunung Bungsu, Bukit Barisan

Judul Tesis :Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya dalam tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali saran tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam latarbelakang pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dan apa yang saya nyatakan diatas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian Usulan Penelitian dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Unversitas Islam Riau.

Pekanbaru, 19 Maret 2019

Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL BAD34AFF724912522 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Hendri Depisya

PERAN DINAS SOSIAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU DALAM PENGAWASAN PANTI SOSIAL DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Oleh

HENDRI DEPISYA

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Sosial Provinsi Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Diantara tugas Dinas Sosial yaitu melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang sosial. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan yaitu ditemukannya pelanggaran-pelanggaran dalam pengelolaan panti sosial di kota pekanbaru seperti kasus meninggalnya seorang balita yang diakibatkan dianiaya di panti asuhan yayasan tunas bangsa, yang mana izin beroperasi dari panti tersebut sudah berakhir pada tahun 2011. Penelitian ini menggunakan konsep pengawasan dari Prof. Drs. Komaruddin yaitu pengawasan adalah untuk menjamin bahwa kegiatan terarah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana dan dalam batas-batas struktur organisasi. Indikator pengawasan merupakan pengembangan standar pelaksanaan, pegukuran hasil pelaksanaan, penilaian hasil pelaksanaan, dan perbaikan. Adapun yang menjadi responden dari penelitian ini yaitu Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, dan Pengelola Panti Sosial. Dari hasil kuesioner dan wawancara yang peneliti dapatkan dari reponden, didapatkan kesimpulan bahwa Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik, namun demikian ditemukan hambatan yang dihadapi oleh dinas sosial. Hambatan yang dihadapi oleh dinas sosial riau dalam melakukan pengawasan yaitu kurangnya sumber daya manusia atau pegawai yang dimiliki oleh dinas sosial yang mengakibatkan kurang maksimalnya pengawasan terhadap panti sosial.

Kata Kunci: Pengawasan, Dinas Sosial, Panti Sosial

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DEPARTMENT OF SOCIAL ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN RIAU PROVINCE OF ELDERLY SOCIAL MONITORING IN PEKANBARU

ABSTRACT

By

HENDRI DEPISYA

The Social Service is the implementing element of Government Affairs which is the authority of the Region. Riau Provincial Social Service as a Regional Organizational Organization that has the task of carrying out regional government affairs based on the principle of autonomy and co-administration tasks in the social field. Among the tasks of the Social Service are monitoring, evaluation and reporting in the social field. The background of this study departs from the phenomena that occur in the field, namely the finding of violations in the management of social care institutions in Pekanbaru city, such as the case of the death of a toddler caused to be mistreated at the nation's foster foundation orphanage, where in 2011. This study uses the concept of supervision from Prof. Drs. Komaruddin namely supervision is to ensure that directed activities go according to goals and plans and within the boundaries of the organizational structure. Monitoring indicators are the development of implementation standards, measurement of results of implementation, evaluation of results of implementation, and improvement. The respondents from this study were the Head of the Social Service Office, Head of Social Rehabilitation Division, Head of Child and Elderly Social Rehabilitation Section, and Social Institution Manager. From the results of questionnaires and interviews that the researchers got from respondents, it was concluded that the role of the Social Service Office of the Regional Government of Riau in Monitoring Social Institutions in the City of Pekanbaru had gone well, but found obstacles faced by the social services. The obstacle faced by the Riau social service in conducting supervision is the lack of human resources or employees owned by the social service which results in a lack of maximum supervision of social institutions.

Keywords: Monitoring, Social Services, Social Institutions

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru".**

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan tesis ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Syafrinaldi, SH selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si Selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau sekaligus Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan Tesis ini.
4. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak/ibu serta saudara/saudari segenap staf dan pegawai Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian tesis ini.
7. Bapak/ibu Pegawai Dinas Sosial Provinsi Riau yang telah membantu dalam memberikan data yang mendukung pembuatan tesis ini.

8. Pengelola panti Sosial yang telah bersedia mengisi kuesioner dan diwawancara dalam Tesis ini.
9. Bapak Syahril dan ibu Tutik selaku ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu memberikan doa restu yang tidak ternilai harganya serta banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahanan kasih sayang yang tiada henti-hentinya.
10. Heru Syahfrian dan Hafizh Nurpisya selaku saudara yang selalu memberikan semangat dan doanya.
11. Iwa Yuwinda Muchari yang selalu membantu dan memberikan dukungan serta semangat dan doanya.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang membangun dari semua pembaca yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi penulis untuk perbaikan dimasa depan.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua yang tersebut diatas karena atas bimbingan, arahan dan pelayanan yang telah diberikan kepadapenulis selama ini, semoga jasa mereka mendapat imbalan dari Allah SWT. Amiin.

Pekanbaru, 19 Maret 2019

Penulis

Ttd

Hendri Depisya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Abstark ..... **i**

Abstarct .....**ii**

Kata Pengantar ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 14
C. Rumusan Masalah 15
D. Batasan Masalah 15
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 16

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan 18
A.1. Teori Ilmu Pemerintahan 18
A.2. Teori Pemerintahan 24
A.3. Konsep Fungsi Pemerintahan 27
A.4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 29
A.5. Teori Organisasi 34
A.6. Teori Manajemen.....39
A.7. Teori Tugas Fungsi 43
A.8. Teori Peranan 44
A.9. Pengawasan..... 45
A.10. Panti Sosial 56
B. Kerangka Pikir 58
C. Hipotesis 59
D. Konsep Opersional 59
E. Operasional Variabel 61
F. Teknik Pengukuran 62

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian 65
B. Lokasi Penelitian 65
C. Populasi dan Sampel 66
D. Teknik Penarikan Sampel 67
E. Jenis dan Sumber Data 68
F. Teknik Pengumpulan Data 68
G. Teknik Analisis Data 69

BAB IV LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Peneltian 71
A.1. Kota Pekanbaru 71

A.2. Dinas Sosial 78
B. Identitas Responden 89
B.1. Jenis Kelamin Responden 89
B.2. Usia Responden 90
B.3. Tingkat Pendidikan Responden 91
C. Hasil Penelitian 91
C.1. Standar 92
C.2. Pengukuran 97
C.3. Penilaian 102
C.4. Perbaiakan 105
D. Analisis Data 108
E. Hambatan Yang Di Hadapi Dinas Sosial Dalam Pengawasan Panti Sosial DI Kota Pekanbaru 113

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 114
B. Saran 115

DAFTAR PUSTAKA..... 116

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Data Jumlah Pegawai Seksi Rehabilitasi Sosial anak Dan Lanjut Usia	6
I.2	Rumusan monitoring, evaluasi dan program kegiatan Dalam RENJA Dinas Sosial Provinsi Riau	8
I.3	Rekap Data Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Se- Provinsi Riau Tahun 2017	9
I.4	Data Lembaga Kesejahteraan Sosial/Orsos Kota Pekanbaru Tahun 2018.....	13
II.1	Operasional Variabel Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Mengawasi Panti Sosial di Kota Pekanbaru	61
III.1	Populasi dan Sampel TentangPeran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru.....	67
IV.1	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	89
IV.2	Responden Berdasarkan Usia	90
IV.3	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	91
IV.4	Tanggapan Responden Untuk Sub Indikator Standar.....	93
IV.5	Tanggapan Responden Untuk Sub Indikator Pengukuran 98	
IV.6	Tanggapan Responden Untuk Sub Indikator Penilaian 102	
IV.7	Tanggapan Responden Untuk Sub Indikator Perbaikan	106
IV.8	Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Tentang Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial di Kota Pekanbaru.....	109

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

II.1 Kerangka Pikiran Tentang Peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru..... 58

IV.1 Bagan Dinas Sosial Provinsi Riau 88

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pemerintah Nasional menurut UU 1945 diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.Pembagian daerah atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya di tetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi,kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang undang.

Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihanyang diatur dalam Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren Pasal 11 dan 12 yang berbunyi :

Pasal 11

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerahterdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan UrusanPemerintahan Pilihan.
2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitandengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yangtidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan denganPelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagiansubstansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan denganPelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (2) meliputi:
    a. pendidikan;
    b. kesehatan;
    c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindunganmasyarakat; dan
    f. sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan denganPelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (2) meliputi:
    a. tenaga kerja;
    b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
    c. pangan;
    d. pertanahan;
    e. lingkungan hidup;
    f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
    h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    i. perhubungan;
    j. komunikasi dan informatika;
    k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
    l. penanaman penanaman modal;
    m. kepemudaan dan olah raga;
    n. statistik;
    o. persandian;
    p. kebudayaan;
    q. perpustakaan; dan
    r. kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
    a. kelautan dan perikanan;
    b. pariwisata;
    c. pertanian;
    d. kehutanan;
    e. energi dan sumber daya mineral;
    f. perdagangan;
    g. perindustrian; dan
    h. transmigrasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun masalah sosial termasuk kedalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.Penyelenggaraan sosial diserahkan kepada daerah kerena daerah lebih mengetahui permasalahan di daerahnya sehingga diharapkan dapat mencari solusi dalam pemecahan permasalahan dan juga agar lebih mempermudah dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan Permensos No. 21 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Provinsi & Kab/Kota TA 2017 maka wewenang tugas sosial berada pada daerah yang mana yang menjalankan tugas tersebut diberikan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau mengatakan bahwaDinas Sosial Provinsi Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, dengan tugas pokok antara lain sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Sosial;
3. Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Sosial lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan Tugas dibidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial Penanganan Fakir Miskin;
5. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial;
6. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun yang mengatur kedudukan dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Riau yaitu Pergub Riau Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau.

Tugas dan fungsi dari Dinas Sosial sendiri diatur dalam Pergub Riau No. 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau, pada pasal 3 (tiga) yang berbunyi:

1. Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepadaDaerah.
2. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
    b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
    d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang yang memiliki tugas untuk membidangi masalah panti sosial yaitu bidang Rehabilitasi Sosial yang mana diatur di dalam Pergub Riau No. 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau**,** pada bagian ke empat, pasal 15, yang berbunyi:

1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anakdan Lanjut Usia,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, SeksiRehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Rehabilitasi Sosial;
    b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Rehabilitasi Sosial;
    c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada KepalaDinas Sosial; dan
    d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuaitugas dan fungsinya.

Dan seksi yang yang memiliki tugas untuk mengatur urusan Panti Sosial yaitu Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, seperti yang diatur pada pasal 16, yang berbunyi:

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas:

a. merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan LanjutUsia;
c. melaksanakan kebijakan di Seksi Rehablitiasi Sosial Anak dan LanjutUsia;
d. menyiapkan bahan koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial denganUnit/ Instansi terkait;
e. melaksanakan kebijakan sesuai norma, standar, prosedur, dan criteria Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dalam panti dan atau lembaga;
f. menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan danverifikasi di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. dalam pantidan/atau lembaga;
g. melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar Anak dan Lanjut Usia dalam panti dan/atau lembaga;
h. menyiapkan rekomendasi pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan pendataan sesuai tugas di Seksi Rehablitiasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Diantara tugas dan fungsi Dinas Sosial yaitu melakukan pemantauan atau pengawasan dan evaluasi dibidang sosial.Pengawasan dan evaluasi diibaratkan sebagai satu keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Maksudnya yaitu pengawasan tanpa evaluasi maka tidak akan terlaksana dengan baik karena tidak adanya pedoman yang digunakan dalam pengawasan. Begitu juga sebaliknya jika evaluasi tanpa pengawasan maka tidak diketahui sampai mana rencana yang sudah dijalankan.

Untuk menunjang pengawasan maka diperlukan Sumber Daya Manusia yang dalam hal ini yaitu pegawai Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. Berikut jumlah pegawasi Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia:

Tabel I.1: Pegawasi Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

NO	Nama Pegawai	NIP	JABATAN
1	Drs. Erwin Kesuma	19620924 198803 1 005	Kabid. Rehabilitasi Sosial
2	Helda, SH	19700219 198903 2 001	Kasi. Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
3	Rohadi Eko Subagya, SH. MH	19671024 199003 1 004	Pelaksana Seksi Rehabilitasi Sosial Anak danLanjut Usia
4	Sukni Afsah, S.Sos	19670608 199102 2 001	Pelaksana Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia
5	T. Widya Wahyuni, SH	19850326 200904 2 003	Pelaksana Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia
6	Rukmaluddin, S.Sos	19681010199102 1 001	Pelaksana Seksi Rehabilitasi Sosial Anak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

			dan Lanjut usia
7	Sukni, S.Sos	19670608199102 2 001	Pelaksana Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia

Sumber: Dinas Sosial Tahun 2017

Dari data diatas dapat dilihat jumlah pegawai Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia yang sedikit yang dalam hal ini berbanding terbalik dengan luas wilayah Provinsi Riau yang sangat luas yaitu 88.672,67 Km^2dan juga jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang cukup banyak terkhususnya pada lembaga Kesejahteraan Anak (Panti Asuhan) dan Lembaga Kesejahteran Sosial Lanjut Usia (Panti Jompo) yang berjumlah 93 di seluruh Provinsi Riau. Dalam hal ini peneliti melihat bahwa dengan jumlah pegawai yang sedikit akan membuat kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau dalam melakukan kegiatan pengawasan terkhususnya pengawasan panti sosial menjadi tidak maksimal. Oleh sebab itu Dinas Sosial harus memperhatikan dan meningkatkan lagi sumber daya manusia yang dimilikinya.

Selain Sumber Daya Manusia, dalam pengawasan juga dibutuhkan Sumber Daya Materi yang di peruntukan untuk membiayai pelaksanaan pengawasan. Berikut Rumusan monitoring, evaluasi program dan kegiatan yang sudah di susun di dalam Rencana Kerja (RENJA) oleh Dinas Sosial Provinsi Riau tahun 2017:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel I.2: Rumusan monitoring, evaluasi dan program kegiatan Dalam RENJA Dinas Sosial Provinsi Riau

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017			
		Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan	Jumlah Kabupaten/kota yang di monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan	Provinsi Riau	12 Kab/Kota	Rp 920.000.000	APBD Provinsi

Sumber: RENJA Dinas Sosial Tahun 2017

Jika dilihat dari jumlah dana yang di anggarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan, anggaran tersebut semestinya cukup untuk memaksimalkan kegiatan pengawasan terhadap panti sosial, terkhusunya di kota Pekanbaru. Dengan memanfaatkan dana tersebut dengan maksimal maka tidak ada alasan bagi dinas sosial untuk melakukan pengawasan langsung secara berkala di lapangan.

Menurut buku panduan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau Buku Penyandang Masalah Kesahjetraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), panti sosial merupakan bagian dari Potensi Sumber kesejahteraan Sosial dan dikategorikan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun LKS yaitu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.Adapun yang menjadi ktietria dari LKS ini adalah:

a. Mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
b. Mempunyai pengurus dan program kerja;
c. Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
d. Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.[1]

Setiap LKS wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun mengenai penyelenggaraan kegiatan, keuangan, sumber daya manusia, aset, serta sarana dan prasarana LKS, dan menyampaikannya kepada dinas/instansi sosial setempat secara berkala.Apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut LKS tidak menyampaikan laporan tertulis, maka LKS dimaksud dianggap tidak aktif.

Berikut jumlah Rekap data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Provinsi Riau:

Tabel I.3:Rekap Data Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Se-Provinsi Riau Tahun 2017

NO	Jenis PKS	PEKANBARU	INHU	ROHUL	KAMPAR	DUMAI	PALALAWAN	BENGKALIS	SIAK	KUANSING	MERANTI	INHIL	ROHIL	JUMLAH
1	Pekerja Sosial Profesional (PKH, Peksos, PKSA)	32	35	27	60	14	23	39	20	27	41	46	45	409
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	145	108	72	180	72	143	188	75	104	101	62	194	1.444
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	327	43	44	100	40	39	41	39	39	30	48	42	832
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	52	7	7	26	12	5	12	6	3	1	13	11	155
5	Karang Taruna (KT)	58	31	119	16	17	101	90	12	78	73	126	101	822
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	3	8	5	7	1	3	8	13	1	3	12	1	65

[1]PMKS & PSKS Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2017. Hlm 15

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	Keluarga (LK3)													
7	Keluarga Poineer	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSKBM)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	10	21	17	33	1	18	10	0	23	20	45	15	213
10	Penyuluh Sosial	2	7	8	13	52	8	10	18	10	3	22	0	153
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	12	14	16	21	7	12	8	14	15	9	20	18	166
12	Dunia Usaha	30	21	26	23	4	9	20	10	36	7	62	4	252
13	Family care Unit (FCU)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total		676	300	346	486	225	366	431	212	341	293	461	436	4.573

Sumber: Dinas Sosial Tahun 2017

Adapun standar Lembaga Kesejahteraan Sosial diatur didalam Permensos No 22 Tahun 2016 tentang Tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.Standar adalah spesifikasi atau patokan pelayanan secara minimal yang dapat digunakan sebagai acuan pelayanan bagi penyelenggaraan pelayanan, pelaksana, dan sarana prasarana.[2]Standar LKS adalah spesifikasi minimal yang dibakukan dan diberlakukan bagi LKS sebagai pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Standar bagi LKS mencakup:

a. Standar kelembagaan, terdiri atas kelengkapan identitas dan legalitas.
b. Standar organisasi dan manajemen, terdiri atas kelengkapan tata laksana dan tata kelola organisasi.
c. Standar program, terdiri atas pengelolaan program dan innovasi/pengembangan pelayanan.
d. Standar sumber daya, terdiri atas:
    1. kelengkapan sarana dan prasarana;
    2. kelengkapan sumber daya manusia; dan
    3. kelengkapan sumber dana

[2]Permensos No 22 Tahun 2016

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Standar kemitraan, mencakup ruang lingkup, fokus, dan mekanisme jejaring.

Panti sosial dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Standar minimum sarana dan prasarana panti sosial meliputi:

a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;
b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian;
c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
d. tenaga pelayanan panti sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
e. peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis;
f. alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Namun demikian dalam pelaksanaan standar tersebut peneliti melihat belumlah terlaksana dengan maksimal, terkhususnya pada standar kelengkapan sarana dan prasarana.Hal ini dapat dilihat dari terjadinya kasus meninggalnya balita dan pengurungan penghuni panti jompo yang dikelola oleh Yayasan Tunas Bangsa didalam ruangan yang tidak layak dan tidak memenuhi standar, dan juga izin yayasan tersebut sudah habis di tahun 2011.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur pulau sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.

Di tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di pulau Sumatera, setelah Medan, Palembang, dan Bandar Lampung. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak yaitu 1.064.566 jiwa, maka hal ini mengakibatkan timbulnya masalah-masalah sosial di dalam masyarakat yang mana diantaranya yaitu masalah anak-anak terlantar dan yang di tinggal orang tua atau anak yatim piatu dan juga orang-orang tua terlantar yang sudah memasuki lanjut usia atau lansia. Melihat fenomena ini maka munculah beberapa panti yang menampung anak yatim piatu dan lansia ini dan dengan seiring waktu berjalan, semakin banyaklah panti-panti soasial tesebut bermunculan.Dari penjelasan tersebut penulis memfokuskan penelitian kepada Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru**.**

Berikut jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang ada di Kota Pekanbaru:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel I.4:Data Lembaga Organiasi Sosial diKota Pekanbaru Tahun 2018

NO	NAMA LKS/ORSOS	ALAMAT	JENIS LKS	JUMLAH KLIEN
1	PA. Putri Aisyiyah Riau	Jl.KH.Ahmad Dahlan	Pelayanan Anak dalam Panti	58
2	PA. Putra Muhammadiyah	Jl. Tuanku Tambusai	Pelayanan Anak dalam Panti	47
3	Yys. Perguruan Thawalib (PA. Bakti Mufaridun)	Jl. Sudirman	Pelayanan Anak dalam Panti	30
4	Yys. Kesatuan Wanita Islam (YKWI)(PA.Amanah)	Jl. Hasyim Ashari	Pelayanan Anak dalam Panti	106
5	Yys. Sri Mujinab (PA. Sri Mujinab)	Jl. Sutomo 105	Pelayanan Anak dalam Panti	20
6	Yys. H. Mahyuddin Datuk AA (PA. As Showa)	Jl. Merpati Sakti No. 11	Pelayanan Anak dalam Panti	36
7	Yys. Tunas Bangsa (PA.Tunas Bangsa)	Jl. Singgalang V	Pelayanan Anak dalam Panti	27
8	Yys. Al-Fath (PA. Al-Fath)	Jl. Indapuri	Pelayanan Anak dalam Panti	62
9	Yys.Yys. Baiturrahman (PA. Baiturrahman)	Jl. Tenayan Raya	Pelayanan Anak dalam Panti	15
10	Yys. Al-Istiklal (PA. Ai-Istiklal)	Jl. Harapan Murni	Pelayanan Anak dalam Panti	60
11	Yys. At-Thoibah (PA. At-Thoibah)	Jl. Kapau Sari	Pelayanan Anak dalam Panti	30
12	YYS. Al-Hidayah (PA. Al Hidayah)	Jl.Fajar Ujung/Safari	Pelayanan Anak dalam Panti	60
13	PA. Al-Fajar		Pelayanan Anak dalam Panti	45
14	PA. An-Nisa	Jl.Dakota Tangkerang Tengah	Pelayanan Anak dalam Panti	29
15	PA. Ar-Rahim	Jl. Garuda Sakti KM 3	Pelayanan Anak dalam Panti	54
16	PA. Mardhotillah	Jl. Hang Tuah Ujung	Pelayanan Anak dalam Panti	35
	UPT DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU			
17	UPT Panti Jompo Tresna Werdha Khusunul Khotimah	Jl. Kaharudin Nasution	Pelayanan LU (Lanjut Usia) dalam panti	80
18	UPT Bina Remaja PSMP tengku Yuk		Pelayanan anak nakal dalam panti	30
19	UPT Pengasuh Anak		Pelayanan Anak dalam Panti	50
20	PSBR Rumbai Pekanbaru (UPT Pusat)	Jl. Khayangan Rumbai	Pelayanan Anak dalam Panti	140

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2018

Dilihat dari banyaknya jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang ada di dikota pekanbaru membuat Dinas Sosial harus lebih maksimal lagi dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melakukan pengawasan-pengawasan terhadap panti tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran- pelanggaran yang dapat merugikan penghuni panti sosial dan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan yang penulis uraikan diatas, penulis mengambil objek penelitian pada Kota Pekanbaru. Alasan penulis mengambil objek di Kota pekanbaru dikarenakan penulis menemukan beberapa fenomena-fenomena yang mana diantaranya yaitu:

1. Masih lemahnya pengawasan atau pemantauan yang dilakukan Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang mana dapat dilihat dari kasus kematian salah satu penghuni panti asuhan Tunas Bangsa yang bernama M. Zikli, balita yang berumur 18 bulan yang diduga tewas diakibatkan dianiya pada tanggal 15 januari 2017.
2. Belum maksimalnya pelaksanaan standar oleh Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang mana dapat di lihat dari penghuni panti jompo dan pasien gangguan jiwa yang dikelola Yayasan Tunas Bangsa Pekanbaru jalan lintas timur KM 20 dan Panti Jompo yang berada di jalan cendrawasih Kecamatan Marpoyan Damai dikurung didalam ruangan bertralis besi dan dikunci dari luar selama bertahun-tahun dalam kondisi ruangan yang tidak layak.
3. Belum maksimalnyaevaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang mana masih ditemukannya panti yang tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melakukan perpanjangan izin beroperasi. Hal ini dapat dilihat dari izin Yayasan Tunas Bangsa yang sudah berakhir pada tahun 2011 dan beroperasi lebih kurang enam tahun tanpa memiliki izin.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang penulis temukan diatas diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut yang nantinya akan diwujudkan dalam sebuah karya ilmiah berupa Tesis dengan judul**:** "**PeranDinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru**"

C. Rumusan Masalah

Dinas sosial mempunyai fungsi untuk mengevaluasi dan mengawasi yang terkait dengan masalah sosial. Dalam pelaksanaan pengawasan masih ditemukan masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Sosial seperti yang sebelumnya dijelaskan pada fenomena penelitian. Berdasarkan fenomena tersebut penulis merumuskan masalah pokok dari penelitian ini yaitu:**"BagaimanakahPeran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam PengawasanPanti SosialDi Kota Pekanbaru"?**

D. Batasan Masalah

Panti sosial dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.Karena panti sosial memiliki cakupan yang luas maka penulis ingin membatasi penelitian ini terhadap peran dinas sosial pemerintah daerah provinsi riau dalam pengawasan panti sosial anak dan panti sosial lanjut usia di kota pekanbaru.

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana Peranan Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pengawasan Panti Sosial di Kota Pekanbaru.
b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan Ilmu Pemerintahan dimasa yang akan datang seiring perkembangan masyarakat yang semakin maju, kritis, dinamis dalam berbagain aspek, termasuk perpolitikan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi Dinas Sosial Provinsi Riau agar melakukan perbaikan-perbaikan untuk kedepannya dalam mengawasi Panti Sosial di Kota Pekanbaru.

c. Dan memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam mengevaluasi tugas Dinas Sosial Provinsi Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Studi Kepustakaan

Menurut Mardalis yang dimaksud dengan studi kepustakaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan di pakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variable-variabel permasalahan yang akan di teliti.[3] Dengan dikemukakannya teori dalam studi kepustakaan akan dapt membantu peneliti dan orang lain untuk memperjelas sasaran dan tujuan peneliti yang dilakukan.

Studi literatur atau kepustakaan selain dari mencari sumber data skunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai kemana ilmu yang berhubungan dengan penelittian telah berkembang, sampai kemana terdapat kesimpulan dan degeralisasi yang telah pernah dibuat, sehingga situasi yang di perlukan dapat diperoleh.

1. Teori Ilmu Pemerintahan

Setiap kegiatan pengkajian ilmiah mempunyai sasaran.Setiap sasaran dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda dan dengan menggunakan alat yang berlainan. Pengkajian terhadap sasaran yang sama (objek

[3]Mardalis, 2003.*Metode Penelitian*(Suatu Pendekatan Proposal).Jakarta : Bumi Hlm :15 Aksara.hlm 32

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

materiil) jika dilihat dari sudut yang berbeda (objek formil) dengan alat yang berbeda, memberikan hasil yang berbeda pula. Oleh karena itu pengkajian terhadap objek yang sama dapat menghasilkan disiplin yang berlainan. Dari sudut mana dan dengan cara apa peristiwa pemerintahan itu dipandang guna menghasilkan ilmu pemerintahan.

Secara etimologi, kata pemerintahan berasal dari kata perintah. Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukakn pekerjaan.[4]

Selain itu pemerintah dapat artikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organiasi negara, pemerintah sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara, seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, dan jabatan yudikatif, dan jabatan suprastruktur lainnya. Jabatan ini menunjukan lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu. Kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu jabatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan jabatan-jabatan lainnya sering juga disebut kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Pemerintahan yang dikemukakan diatas disebut sebagai pemerintahan dalam arti umum atau luas (Goverment in the broads sense).[5]

Menurut D.G.A Van Poelje (1953; 1) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.[6]

---

[4]Rosidin, utang. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi.* Bandung, CV. Pustaka Setia. Hlm:1
[5]Ibid,. Hlm:2
[6] Syafiie, Kencana, Inu. 2011, *Etika Pemerintahan,* Jakarta, PT. RINEKA CIPTA. Hlm : 62

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut U. Rosenthal (1977; 17) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan proses pemerintahan umum.[7]

Menurut H. A. Brasz (1975; 1) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya.[8]

Menurut C.F. Strong (1960; 6) pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamain dan keamanan negara, oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuat undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelanggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.[9]

Menurut Mac Iver (1960; 5) pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Jadi menurut Mac Iver, ilmu pemerintahan adalah sebagai sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah (*a science of how man are governed*).[10]

[7] Ibid., Hlm 62
[8] Ibid., Hlm 63
[9] Ibid., Hlm 63
[10] Ibid., Hlm 63

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Woodrow Wilson (1924; 9), pemerintahan adalah suautu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.[11]

Menurut Talizuduhu Ndraha (2002; 10), ilmu pemerintahan adalah ilmu yang memperlajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sivil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.[12]

Menurut Samuel Edward Finer (1974; 3-4), pemerintah harus mempunyai kegiatan terus-menerus (*proces*), negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*) dan cara, metode serta sistem (*manner method and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat.[13]

Menurut Musanef (1985; 7), ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.[14]

Menurut Soemandar (1985; 1), pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketentran dan ketertiban umum, tuntuntan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan

[11] Ibid., Hlm 64
[12] Ibid., Hlm 64
[13] Ibid., Hlm 65
[14] Ibid., Hlm 65

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengautran-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.[15]

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung oleh beberpa hal, diantaranya adalah filsafat hidup masyarakat dan filsafat politik masyarakat itu.[16]

Menurut Prajudi Atmosodirjo (1984; 19), tugas pemerintah antara lain adalah tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi pemerintah adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan.[17]

Afan Gaffar didalam makalah pada seminar pengembangan ilmu pemerintahan yang diselenggarakan oleh Institu Ilmu Pemerintahan Pada 25 juli 1995 mendefiniskan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang memepelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara.[18]

Ilmu pemerintahan menurut Brasz (dalam Syafiie 2005;21) mengemukakan bahwa maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan di fungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.[19]

---

[15] Ibid., Hlm 65
[16] Ibid., Hlm 65
[17] Ibid., Hlm 65
[18] Ndaraha, Talizuduhu. 1997, *Metodologi Ilmu Pemerintahn,* Jakarta, PT. RINEKA CIPTA. Hlm : 16
[19] Syafiie, Kencana Inu. 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan,* Bandung, PT. Refika Aditama hlm : 21

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ilmu pemerintahan menurut Syafiie (2011;23) adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif) kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahannya, secara baik dan benar.

Ilmu pemerintahan dapat didefenisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan antara hubungan dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas tersebut;
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai kebulatan yang menyelidiki sistematis problem-problem sentralisasi, desentralilasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau;
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan pemerintah dan yang diperintah. Dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan pihak yang lain dan mengusahakan agar dapat keserasian pendapat dan daya tindak yang efektif dan efesien dalam pemerintahan, atau;
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap sususan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Dengan demikian menurut Syafiie ilmu pemerintahan dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi, dan eksekusi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta yang memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.[20]

[20]Syafiie, Kencana Inu. 2011, *Pengantar Ilmu Pemerintahan,* Bandung, PT. Refika Aditama. Hlm 10

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Teori Pemerintahan

Menurut CF. Strong, pemerintah adalah organisasi yang melakukan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kementrian-kementrian.Pemerintah dalam arti luas meliputi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan kehakiman.Sedangakan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi kekuasaan eksekutif saja.[21]

Ermaya Suradinata menjelaskan lebih lanjut bahwa pemerintahan adalah lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan negara, dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.[22]

Sedangkan Ndraha mengemukakan bahwa pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsunmg dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan kelompok termasuk dalam keluarga.[23]

Adapun W.S. Sayre mendefiniskan pemerintahan sebagai lembaga negara yang terorganisasi yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.[24]

Jo Ann G. Ewalt berpendapat:

Governance Identifies the power dependence involved in the relationships between instiutions involved in collective action. Organization are defendent upon each other for the achievment of collecting action, and

[21] Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah.* Bogor. Ghalia Indonesia. Hlm 8
[22]Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah.* Jakarta. Pt. RajaGrafindo Persada. Hlm 55
[23] Ibid., Hlm 55
[24] Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan.* PT RajaGrafindo Persada. Hlm 18

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

thus must exchange resouces and negotiate shared understandings of ultimate program goals.[25]

Maksudnya adalah pemerintahan mengidentifikasi ketergantungan daya yang terlibat dalam hubungan antara lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif. Organisasi tergantung pada suatu sama lain untuk pencapaian tindakan kolektif, dan dengan demikian harus ada pertukaran sumber daya dan mengoisasikan pemahaman bersama tentang tujuan program utama (dari organisasi tersebut).

Sebagai dasar tentang teori pemerintahan, terdapat berbagai teori seperti (dalam buku Ilmu Negara, Prof. Drs. C.S.T. Kansil. S.H, 2007; 111) yaitu:

1. Kekuasaan tuhan

Menurut beberapa sarjana, maka sebagai dasar pemerintahan adalah kitab suci, dimana segala sesuatu disalurkan melalui kehendak tuhan.Sampai zaman baru ini, pendapat tentang pemerintahan yang berdasarkan kitap suci tetap dipertahakan kebenarannya oleh seorang hukum dan negarawan bangsa jerman yang beranama Friedrich Julius Stahl.

Menurut Stahl, kekuasaan pemerintahan adalah suatu ciptaan tuhan, dalam arti kata atas firman tuhan dan bahwa kekuasaan pemerintahan adalah suatu badan yang mendapat izin dan kekuasaan dari tuhan.[26]

2. Perjanjian Masayarakat

Berlainan dengan pendapat Stahl, maka terdapat teori-teori yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintahan itu tidak bersandarkan atas

[25] Awang, Azam. 2011. *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia.* Pekanbaru: ALAF RIAU. Hlm 11
[26] Kansil, Christine. 2007. *ilmu negara,* Jakarta, Pradnya Paramits. Hlm 111

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kekuasaan tuhan, akan tetapi kekuasaan pemerintahan itu adalah suatu bentukan ciptaan manusia, yaitu berdasarkan atas perjanjian masyarakat.

Menurut Jean Jacques Rousseau yang teorinya disebut dengan contrat social Roussseau, yaitu perjanjian dimana semua rakyat berhak untuk ikut serta mengadakannya, dan bahwa tiap-tiap orang dalam perjanjian ini harus menyerahkan segala hak dan kekuasaan dan kemerdekaannya demi kepentingan masyarakat seluruhnya, sehingga dengan demikian terbentuklah suatu pemerintahan yang berdaulat.[27]

3. Kedaulatan Hukum

Adapun menurut H. Krabble, mengatakan bahwa tidaklah benar suatu pemerintahan itu suatu sumber kekuasaan merdeka dengan hak untuk ditaati, yang benar adalah kekuasaan pemerintahan yang dibenarakan menurut hukum, jadi kekuasaan pemerintahan adalah suatu kekuasaaan yang telah ditetapkan meurut tindakan-tindakan dan hukuman-hukuman atas pelanggaran tertentu. Hukum sendiri terpengaruh kekuatannya oleh rasa keadilan manusia.[28]

> Pemerintahan berasal dari kata " perintah" yang telah ditambah awalan "pe" menjadi kata "pemerintah" dan ketika mendapat akhiran "an" menjadi kata "pemerintahan", dalam hal ini beda antara "pemerintah" dengan "pemerintahan" adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. Didalam kata dasar "perintah"paling sedikit ada empat unsure penting yang terkandung menurut Syafiie , yaitu sebagai berikut:
> a. Ada dua pihak yang terlibat
> b. Yang pertama pihak yang memerintah di sebut penguasa atau pemerintah
> c. Yang kedua pihak yang diperintah atau rakyat
> d. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan[29]

[27] Kansil, Christine. 2007, *ilmu negara,* Jakarta, Pradnya Paramits, Hlm 111
[28] Kansil, Christine. 2007, *ilmu negara,* Jakarta, Pradnya Paramits, Hlm 112
[29]Syafiie, Kencana Inu. 2011, *Pengantar Ilmu Pemerintahan,* Bandung, PT. Refika Aditama. Hlm:5

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimannya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia, berhak menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayankannya.

Syafiie menyimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

3. Konsep Fungsi Pemerintahan

Adapun berberapa fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktifitas yang di lakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu:

a. Fungsi pengaturan, Fungsi pengaturan ini di lakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang di sepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, penerapan peraturan dan pemberian sanksi bagi yang melanggarnya.
b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah di bebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga di lakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaanya cukup tangguh dan berbobot.

c. Fungsi pelayanan, fungsi ini merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.[30]

Sedangkan menurut Ndraha (dalam Labolo), pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi Primer (Pelayanan)

Fungsi primer (pelayanan) yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa jasa publik yang tidak dapat di privatisasikan termasuk jasa hankam, pelayanan sipil dan layanan birokrasi.

2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)

adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (*powerless*) termasuk penyedian dan pembangunan sarana dan prasarana.[31]

Dari tugas-tugas diatas terlihat bahwa tugas pemerintah sangat kompleks oleh karena itu kepala Negara sebagai penanggung jawab pemerintahan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat-pejabat dibawahnya seperti pemerintah provinsi untuk menjalankan tugas kepemerintahan di Daerah, berdasarkan asas pembantuan, demikian juga pemerintah provinsi dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah di Kabupaten atau Kecamatan untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan.

[30]Ndraha, Tazilidun, 2003, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta, Rineka Cipta, Hlm.75
[31]Ndraha (dalam Labolo) 2006, Ilmu Pemerintahan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 25

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya fungsi pemerintahan dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu: Pelayanan (*public service*), Pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*) dan pengaturan (*regulation*). Dengan mengutip D. Rosevelt (dalam Rasyid) menyatakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya.Artinya fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri.Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Jika di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka yang disebut pemerintah dapat dibedakan menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden berserta menteri, sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah tersebut.[32]

Berdasarkan pemikiran diatas, maka yang dimaksud dengan pemerintahan di daerah merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh didalamnya ada komponen-komponen, yaitu kepala daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, sekretaria daerah, sekretairat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, serta

[32] Djaeunri, Aris. Op. Cit. Hal 9

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perangkat darah otonom lain yang masing-masing memiliki fungsi tertentu yang saling terkait dan saling bergantung, baik berdasarkan asas desentralisasi, asas tugas pembantuan, asas dekonsentrasi serta asas *vrijbestuur* dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.[33]

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan denga prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[34]

Dipertegas pada ayat (3) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Selanjutnya pada ayat (6) menjelaskan kembali bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan, terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

---

[33] Ibid., Hlm 9

[34]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi:

a. politik luar negeri;
b. pertahanan;
c. keamanan;
d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan
f. agama.

Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.Urusan pemerinahan konkruen yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintah konkruen sebagaimana dimaksud adalah urusan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

a. pendidikan
b. kesehatan
c. pekerjaan umum dan penataan ruang
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
f. sosial

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

a. tenaga kerja
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
c. pangan
d. pertanahan
e. lingkungan hidup
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana
i. perhubungan
j. komunikasi dan informatika
k. koperasi,usaha kecil dan menengah
l. penanaman modal
m. kepemudaan dan olah raga
n. statistik
o. persandian
p. kebudayaan
q. perpustakaan
r. kearsipan.

Selanjutnya yang disebut urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Ayat (1) diatas meliputi:

a. kelautan dan perikanan
b. pariwisata
c. pertanian
d. kehutanan
e. energi dan sumber daya mineral
f. perdagangan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. perindustrian
h. transmigrasi.

Selanjutnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umumadalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Adapun urusan pemerintahan umum meliputi:

a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila,pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional
d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Teori Organisasi

James D. Mooney mendefiniskan organisasi sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suaut tujuan bersama.[35]

Adapun John D. Millet mendefinisikan organisasi sebagai kerangka struktur di mana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.[36]

Sementara itu Herbert A. Simon mengartikan organisasi sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain di dalam suatu kelompok orang-orang.[37]

Wiliam G. Scott merumuskan organisasi sebagai: *Organisasi Formal* merupakan sistem kegiatan-kegiatan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja secara bersama-sama, menuju ke arah tujuan bersama di bawah kewenangan dan kepemimpinan.[38]

Sedangkan Sondang P. Siagian menyatakan Organisasi sebagai berikut:

> *Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan terikat secara formal dalam satu ikatan hierarki di mana selalalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang di sebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.*[39]

[35] Nawami, Zaidan. Op . Cit. Hlm 75
[36] Ibid,. Hlm 75
[37] Ibid,. Hlm 75
[38] Kartono, Kartini. 2014. *Pemimpin dan Keemimpinan*. Jakrata.PT. RajaGrafindo Persada. Hlm 7
[39] Ibid., Hlm 7

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Chester I. Barnard, organisasi adalah sebuah sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.[40]

Dwight Wald mendefinisikan organisasi sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi.[41]

Adapun menurut Luther Gulick berpendapat bahwa organisasi adalah sebagai suautu alat penghubung satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang di tenpatkan dalam struktur kewenangan. Dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.[42]

Pengertian organisasi menurut Mooney dalam Syafiie adalah sebuah bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk pencapaian suatu tujuan tertentu bersama.Lain lagi menurut Gulick dalam Syafiie, dimana memberikan defenisi organisasi sebagai suatu alat saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan, jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah daripada atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai kedasar dari seluruh badan usaha.

[40] Syafiie, Kencana, Inu. 2013. *Ilmu Pemerintahan.* Jakarta: PT Bumi Aksara. Hlm 128
[41] Ibid,. Hlm 129
[42] Ibid,. Hlm 129

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Millet dalam Syafiie organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Sementara menurut Simon (dalam Syafiie, organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain didalam suatu kelompok orang-orang.Defenisi organisasi menurut Syafiie adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan, jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah dari atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai kedasar dari seluruh badan usaha.[43]

Menurut Mc. Farland, organisasi adalah suatu kelompok manusia yang dapat dikenal yang menyumbangkan usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan.[44]

Adapun menurut Dimock, organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian saling ketergantungan/berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.[45]

Dari defenisi-defenisi tersebut diatas penulis berkesimpulan bahwa organisasi merupakan

[43]Syafiie, Kencana Inu. 2011. *Manajemen Pemerintahan,* Jakarta: PT Perca. Hlm: 11-12

[44] Indrawijaya, Ibrahim, Adam. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi.* Bandung: PT Refika Aditama. Hal:9

[45] Ibid,.Hal:9

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi
2. Didalam terjadinya berbagai hubungan atas individu maupun kelompok baik dari organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi
3. Terjadinnya proses dan pembagian tugas
4. Berlangsungnya proses aktifitas berdasarkan kinerja masing-masing

Pengembangan organisasi di perlukan karna organisasi harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di berbagai aspek kehidupan seperti teknologi, politik, ekonomi, dan budaya yang kompleks dan penuh ketidakpastian.

Pengembangan organisasi merupakan sesuatu yang relatif baru yang dengan cepatnya berubah sebagai akibat pengetahuan baru. Dengan demikian ada beberapa ketidaksesuaian di antara penulis dan praktisi tentang hakikat dan luasnya pengembangan organisasi.Dalam kenyataan, tidak ada satu definisi yang dapat di setujui oleh semua pihak.

Menurut Siagian ada beberapa pegertian tentang pengembangan organisasi yaitu :

1. Pengembangan organisasi merupakan suatu proses yang meliputi serangkaian perencanaan perubahan yang sitematis yang di lakukan secara terus menerus oleh suatu orgaanisasi
2. Pengembangan organisasi merupakan suatu pendekatan situasional atau kontigensi untuk meningkatkan efektifitas organisasi
3. Pengembangan organisasi lebih menekankan pada sistem sebagai sarana perubahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Pengembangan organisasi meliputi perubahan yang sengaja di rencanakan.[46]

Organisasi dirumuskan sebenarnya sangat bergantung pada kontek dan perspektif tertentu dari seseorang yang merumuskan tersebut, sebagai contoh Victor A. Thompson menyatakan bahwa :

"suatu organisasi adalah suatu integrasi dari sejumlah spesialis-spesialis yang bekerja sama sangat rasional dan impersonal unutuk mencapai beberapa tujuan spsesifik yang telah diumumkan sebelumnya"[47]

Chester Barnard sendiri juga mempunyai rumusan tertentu tentang organisasi sesuai dengan perspektifnya, ia merumuskan orgnaisasi sebagai berikut:

"suatu organisasi adalah suatu sistem dari aktivitas-aktivitas orang yang terkoordinasikan secara sadar atau kekuatan-kekuatan yang terdiri dari dua orang-orang atau lebih"[48]

Pandangan klasik tentang organisasi dinyatakan oleh Max Weber dengan mendemonstrasikan pendapatnya mengenai birokrasi.Weber membedakan suatu kelompok kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan. Menurut dia kelompok kerja sama adalah suatu tata hubungan sosial yang dihubungkan dan dibatasi oleh aturan-aturan. Aturan-aturan ini sejauh mungkin dapat memaksa seseorang untuk

[46]Siagian, Sondang P. 2007, *Fungsi-Fungsi Manajerial.* Jakarta. Halaman 4

[47] Thoha,Miftah . 1984. *Dimensi-dimnesi prima Ilmu Asdministrasi Negara*. Hlm 123
[48] Ibid,. Hlm 124

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melakukan kerja sebagai suatu fungsinya yang ajek, baik dilakukan oleh pimpinan maupun oleh pegawai-pegawai adminstrasi lainnya.[49]

Organisasi harus memiliki dan mempertahankan karyawan terbaik, tercerdas, sangat beragam dan melaksanakan inovasi. Organisasi harus memiliki karyawan yang dapat bekerja sama untuk menghasilkan produk lebih baik dengan lebih cepat/melasanakan proses lebih baik di tempat kerja. Organisasi perlu memfasilitasi bakat karyawan, menyediakan sumber daya yang sesuai untuk inovasi.[50]

Organisasi harus menciptakan:

1. Lingkungan pembelajaran konstan yang mendukung tantangan positif.
2. Lingkungan tidak menakutkan, tempat terjadinya komunikasi dan kolaborasi antara semua pihak.
3. Lingkungan beragam, tempat orang berpikir berbeda dan menghargai pemikiran orang lain.
4. Cara baru memandang masalah, peluang dan kepakaan kuat atas sesuatu yang mendesak.[51]
5. Budaya yang mempengaruhi bakat secara efektif.

6. Teori Manajemen

Menurut Mary Parker Follet, manajemen sebagai seni daam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Atau sebagai pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang ada sehingga hasilnya maksimal.[52]

---

[49] Ibid,. Hlm 124
[50]Sedarmayanti. 2011. *Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan Serta Meningkatkan Kinerja Untuk Meraih Keberhasilan.* Hal 2
[51]Ibid,. Hlm 2

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun J. G. Longenecker mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses kegiatan manajer dalam mengambil keputusan, mengkoordinasikan usaha-usaha kelompok, dan kepemimpinan.[53]

Lebih teknis lagi, Kast & Rosenzweig mengartikan manajemen merupakan kegiatan yang meliputi kordinasi orang-orang dan koordinasi sumber-sumber material untuk mencapai tujuan organisasi.[54]

Sementara itu L. Sisk mendefinisikan manajemen sebagai koordinasi dari semua sumber (tenaga manusia, dana, material, metode kerja, dan tempat) melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian supaya dapat mencapai sasaran yang diinginkan.[55]

Menurut Ermaya Suradinata manajemen adalah kemampuan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan manusia dan berbagai sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara seefisien mungkin.[56]

Manajemen menurut R.W. Morell dalam bukunya "*management: Ends and Means"* menuliskan "manajemen adalah aktivitas dalam organisasi, terdiri dari penentuan tujuan-tujuan (sasaran) suatu organisasi, dan penentuan sarana-sarana untuk mencapai sasaran secara efektif.[57]

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

[52] Nawawi, Zaidan. Op. Cit. Hlm 10
[53] Ibid,. Hlm 11
[54] Ibid,. Hlm 11
[55] Ibid,. Hlm 11
[56] Ibid,. Hlm 14
[57] Kartono, Kartini. Op. Cit. Hlm 13

Mary Parker Follet dalam Indriyo Gitosudarmo (1996), mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.[58]

Sementara itu Ricky W. Griffin dalam Indriyo Gitusudarmo (1996), mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrol sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.[59]

Menurut G.R. Terry (2006), manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.[60]

Menurut Frederick W. Taylor dalam bukunya *Scientific of Mangement* (1947) mengatakan bahwa ilmu manajemen dapat diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarkan akan anda kerjakan selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta termudah.[61]

Menurut Oliver Sheldon dalam bukunya *The Philosophy of Management* (1930) mengatakan bahwa kegunaan manajemen adalah sebagai fungsi kajian industri dalam pelaksanaan kebijakan dipandang dalam batas-batas kumpulan penyelenggaraan dalam pekerjaan organisasi untuk tujuan khusus yang akan datang.[62]

George R.Terry dalam bukunya *Principles of Management* (1964) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan

[58]Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah.* Hlm 2
[59] Ibid., Hlm 2
[60] Ibid., Hlm 2
[61] Syafiie, Kencana, Inu. *Ilmu Pemerintahan.* Op. Cit. Hlm 125
[62] Ibid,. Hlm 125

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.[63]

John D. Millet dalam bukunya *Management in the public Services* (1954) mengatakan bahwa manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.[64]

Adapun menurut Ordway Tead dalam bukunya *The Arts od Administration* (1951) mengatakan bahwa manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[65]

Stoner dan Freeman, (dalam Danang 2012;2) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah di tetapkan.

Sedangkan menurut Terry (dalam Syafiie, 2011;2) yang dimaksud manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Selanjutnya menurut Tead (dalam Syafiie, 2011;2) manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

[63] Ibid,. Hlm 126
[64] Ibid,. Hlm 126
[65] Ibid,. Hlm 126

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Manajemen mempunyai fungsi yang disebut dengan fungsi-fungsi manajemen berfungsi mengelola 6 M yaitu: Man, Machine, Material, Money, Methoda, dan Market. Man adalah manusi atau SDM yang berfungsi mengelola 5M lainnya. Dengan adanya SDM yang mempunyai potensi maka pengelolaan 5M lainnya dapat berkembang dengan baik yang dapat mengahasilkam kreatifitas dan inovasi dan membaut perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat memenangkan persaingan pada pasar global melalui inovasi yang dapat mengahasilakn cost leadership dan product differensiasi yang semakin mengglobal.[66]

7. Teori Tugas Dan Fungsi

Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan.Selanjutnya tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap. (Moekijat, 1998;1)

Sedangakan Thoha (2011;76) tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib di kerjakan oleh seseorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimiiliknya untuk menyesuaikan program kerja yang telah di buat berdasarkan tujuan , visi, misi suatu organisasi. Selanjutnya tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. (Thoha, 2011;79)

[66]Tanjung, Rusli, Amries. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Stratejik. Pekanbaru: UR Press. Hlm. 1*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Moenir (2010;24) fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Sementara menurut Winardi (2003;26) tugas pokok dan fungsi adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

8.Teori Peranan

Peranan berasal dari kata peran.Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007;845)"peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan".

Kedudukan dan peranan merupakan unsur-unsur baku dalam sistem lapisan, dan mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial. Sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dalam masyarakat dan antara individu dengan masyarakatnya, dan tingkah laku individu-individu tersebut.Dalam hubungan-hubungan timbal balik tersebut, kedudukan dan peranan individu mempunyai keseimbangan kepentingan-kepentingan individu termaksud.Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan.Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukanya, dia menjalankan suatu peranan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peranan menurut Soekanto (2007;212):"Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan".

Menurut soekanto (2007;213) mencakup sedikit tiga pengertian:

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi sruktur sosial kemasyarakatan.

Dari pengertian-pengertian tersebut maka peranan mengandung maksud sesuatu yang menjadi tugas, fungsi dan kewajiban terhadap sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam suatu organisasi.Sebuah pemerintahan yang berjalan dan berkembang tidak terlepas dari pembuatan kebijakan sebagai awal dari arah tujuan pembangunan.

Dari pengertian tersebut maka peranan mengandung maksud sesuatu yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan terhadap sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam kedudukan suatu organisasi.

9. Pengawasan

Sebagaimana di kemukakan oleh Ibrahim (dalam Fathoni, Abdurrahmat, 2009), pengawasan merupakan kegiatan manajer agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.[67]Jika teori ini dikaitkan dengan kajian yang diangkat yaitu tentang peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Riau dalam pengawasan

[67] Fathoni, Abdurahman. 2009. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia.* PT RINEKA CIPTA, Hal:31

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Panti Sosial di Kota Pekanbaru, peneliti melihat bahwa kegiatan manajer yang dilakukan oleh dinas sosial provinsi Riau belum berjalan dan terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kejadian yang terjadi diawal tahun 2017 dimana dinas Sosial Provinsi Riau mengalami kecolongan atau lepasnya pengawasan yang mengakibatkanterjadi kasus tewasnya seorang balita penghuni panti dan pengurungan penghuni panti jompo yang dikelola oleh yayasan tunas bangsa yang mana izin dari panti tersebut sudah habis dan belum diperbarui. Dalam kasus ini Dinas Sosial baru turun kelapangan ketika sudah terjadinya kejadian tersebut, hal ini berlawanan dengan teori diatas yang mengatakan bahwa pengawasan merupakan kegiatan manejer agar kegiatan-kegiatan dapat terlaksana dengan baik.Dari kejadian tersebut menunjukan bahwa kegiatan manajer yang dilakaukan dinas sosial provinsi riau tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan perencanaan sehingga hasil dari kegiatan tersebut tidak berjalan dan tercapai.

Menurut Komaruddin (1992;5), pengawasan adalah untuk menjamin bahwa kegiatan terarah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana dan dalam batas-batas struktur organisasi. Adapun indikator pengawasan merupakan pengembangan standar pelaksanaan, pegukuran hasil pelaksanaan, penilaian hasil pelaksanaan, dan perbaikan.

Ada banyak alasan mengapa pengawasan penting dan dibutuhkan. Alasan sangat fundamental dan universal mengapa pimpinan membutuhkan pengawasan adalah kebutuhan memonitor apa yang orang atau unit organisasi sedang dikerjakan dan secara khusus hasil dari apa yang mereka kerjakan. Alasan lain adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang dihadapi oleh organisasi dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pimpinan. Pengawasan sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengamati daan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kajian administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah atau yang benar, tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan.Kata mengawasi dapat diartikan sebagai melihat dan memperhatikan.

Adapun Rahmat (dalam Fathoni, Abdurrahmat, 2009) mendefiniskan pengawasan sebagai fungsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen.[68]Pengawasan adalah fungsi manajer yang merupakan penyuluhan dan perbaikan dan pelaksanaan kegiatan pada bawahaannya agar yakin bahwa sasaran-sasaran perusahaan dan rencana-rencana yang telah dirancang dapat dicapai.

Ishak Sholihin (dalam Fathoni, Abdurrahmat, 2009) mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.[69]

Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa indonesia jelas sekali bedanya, meskipun dalam literatur manajemen yang berbahasa inggris, kedua

[68] Ibid,.Hal:32
[69] Ibid,.Hal:32

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengertian tersebut tidak dibedakan dalam kata "*controlling"* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga "*controlling"* lebih luas artinya dari pengawasan.Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.Pengendalian berasala dari kata kendali, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar.[70]

Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada objek yang dikendalikan.[71] Jadi, kegiatan pengawasan akan menghasilkan pengetahuan tentang objek pengawasan sedangkan hasil dari suatu pengendalian adalah tindakan yang searah dan sesuai dengan apa yang dikehendaki subjek pengendali.

Soekarno mendefenisikan pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.[72] Dari rumusan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan Sarwoto mendefinisikan pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan

[70] Situmorang, V,M, Juhir,J,1998 *Aspek Hukum Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan* (Cet.II),jakarta, Rineka Cipta.hlm.18

[71] Sujamto,1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* (cet.II),jakarta, Ghalia Indinesia.hlm.24

[72] Situmorang, V,M, Juhir,J. Op. Cit.hlm.20

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pekerejaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengn rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.[73]

Irawan Soejito mengatakan pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.[74]

Pengawasan dilihat dari segi subjek atau pelaksana pengawasan menurut Burhanudin dapat dibedakan sebagai berikut: (1) Pengawasan Internal, yakni pengawasan yang diadakan oleh pimpinan organisasi sendiri dan bukan dari pihak lain, sebagai contoh pimpinan mengadakan pengawasan terhadap bawahannya secara rutin, (2) Pengawasan Eksternal, yakni pengawasan yang diadakan oleh pihak luar. Secara struktural biasanya dilaksanakan oleh pimpinan-pimpinan ditingkat lebih tinggi, (3) Pengawasan Formal, yakni pengawasan yang dilakuan oleh petugas-petugas resmi dan biasanya pada rencana atau jadwal pengawasan rutin, (4) Pengawasan Informal, yakni pengawasan yang dilakukan oleh petugas-petugas tidak resmi yang sewaktu-waktu ditunjuk. [75]

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemerikasaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya.“Dalam ilmu manjemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan

[73] Ibid,hlm.18.
[74] Irawan Soejito, *Pengawasan Terhadap Pearaturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*,Jakarta,Bina Aksara,1983,hlm.9.
[75] Azwar Aziz, Loc Cit.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terakhir dari fungsi manajemen". Dari fungsi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai:[76]

> "*pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana peraturan".* Atau
>
> *"suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang terlah terjadi dapat segala diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya".*

Sementara itu, dari segi Hukum Administrasi Negara, pengawasan dimaknai sebagai:

> *"proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahan".*

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pengawasan intern dan ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan".

[76] http//www.jenispengamasan.com

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (builtin control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspketorat jendaral pada setiap kementrian dan inspktorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya dibawah pengawasan kementrian dalam negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasn yang berada diluar unit organisasi yang diawasi.Dalam hal ini di Indonesoa adalah badan pemeriksa keungan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya diantara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktifitas pemerintah.

2. pengawasan preventif dan represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suautu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinyannya penyimpangan”. Lazimnya, pengawan ini dilakukan pemerintah dengan maksud menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Disisi lain, pengawsan ini dimaksudkan agar sistem tpelaksanaan anggaran dapat berjalan sbagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan kan terdeteksi lebih awal.

Disisi lain, pengawasan repersif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan”. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggara yangb telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya.Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “ pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan yang bersangkutan”. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran”. Disisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechmatighed) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya”. Smentera, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluran tersebut diperlukan dan beban biaya serendah mungkin”.

4. pengawasan kebenaran formil meurut hak (rechtimatigheid) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam kaitannyan dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan negara yang tertuju kepada aparatur atau pegawai negeri”.Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.[77]

Menurut Siagian (2005:125) Pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan pengawasan menurut Siagian (2002:259) pengawasan dilakuakan bertujuan untuk mencegah terjainya diviasi dalam operasional atau rancana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efesiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin.

Sementara itu yang dimaksud dengan pengawasan menurut Marnis (2008;329) adalah suatu proses pemonitoran kegiatan operasional untuk mengetahui apakah kinerja sesuai dengan standard dan tujuan organisasional yang diharapkan.

Pengawasan menurut Terry (dalam Syafiie, 2011;109) adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu

[77] http//www.jenis dan sasaran.com

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaksanaan menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Sementara itu batasan pengawasan lain seperti menurut Siagian (dalam Syafiie, 2011;110) yakni proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Defenisi pengawasan yang lain seperti menurut Newman (dalam Sukarna, 2011;111) yakni tindakan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Defenisi yang hampir sama juga diungkapkan oleh Fayol (dalam Sukarna, 2011;111) yaitu pemeriksaan apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, intruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

Melihat definisi-definisi diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan intruksi-intruksi sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Dengan melaksanakan pengawasan dapat mengetahui atau mencegah penyimpangan-penyimpangan dari pemanfaatan sumber-sumber dan pelaksanaan kegiatan apabila terjadi penyimpangan dari apa yang direncanakan maka dapat dilakukan tindakan perbaikan.

Selain itu juga bisa dikatakan pengawasan juga dapat dijelaskan sebagai suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan perbaikannya.

Pentingnya pengawasan sebagaimana peneliti kutip dari Marnis (2008;329) yakni:

1. Pengawasan menyediakan jaminan kepada pimpinan bahwa organisasi yang dipimpinnya berjalan sessuai dengan arah yang pimpinan inginkan.
2. Pengawasan memungkinkan pimpinan membimbing bawahannya, melalui control bawahan akan mengetahui apa yang penting dilakukan dan apa yang pimpinan harapkan.

Sementara itu prinsip pengawasan menurut Herujito (2004;242) yakni:

a. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi
b. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi
c. Luwes
d. Mencerminkan pola organisasi
e. Ekonomis
f. Dapat mudah dipahami
g. Dapat segera diadakan perbaikan

Menurut Komaruddin (1992;5) pengawasan dapat dilihat:

1. Standar
2. Pengukuran
3. Penilaian
4. Perbaikan

Ketika pengawasan berlangsung, kegiatan pertama yang perlu dilakukan adalah pengembangan standar, Pelaksanaan dengan cara menetapkan alat alat pengukur sehingga kita dapat menilai setiap pelaksanaan yang sedang atau sudah selesai. Standar yang objektif dan cermat dan serasi dengan keadaan yang khusus

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

harus ditetapkan.Kegiatan kedua adalah pengukuran hasil pelaksanaan yang merupakan kegiatan menetapkan status pelaksanaan yang sedang dan telah selesai dilaksanakan.Pengukuran ini dapat dilakukan bilamana pra pengawas mengadakan observasi, menerima dan membuat laporan.Kegiatan berikutnya adalah penilaian hasil pelakasanaan. Dengan cara membandingkan pelaksanaan dengan standar yang ada orang dapat menilai keberhasilan (efektivitas) dan biaya yang paling diperlukan untuk mencapai hasil tersebut (efesien). Apabila terdapat selisih atau penyimpangan yang berarti, maka tindakan perbaikan perlu dilakukan.

10. Panti Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional, pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dituangkan melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan berperan dalam peningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Penyelenggaraan kesejahteraan diimplementasikan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial yang dijalankan secara terarah, terpadu danberkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009tentang Kesejahteraan Sosial. Untuk mendukung pembangunan sosial, dibuthkan partisipasi dan peran dari masyarakat. Salah satu partisipasi yang dapat masyarkat lakukan yaitu dengan mendirikan lembaga kesejahteraan sosial atau disebut dengan LKS.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Peraturan menteri nomor22 tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial,LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan Panti sosial merupakan bagian dari Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Adapun yang menjadikriteria LKS yaitu :

a. Mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
b. Mempunyai pengurus dan program kerja;
c. Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
d. Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Salah satu lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah Panti Sosial yaitu lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukanpendampingan terhadap keluarga dan masyarakat dalam pengasuhan anak (Departemen Sosial RI, 2008: 11).

Panti sosial yaitu Lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial. (Kepmensos No.50/HUK/2004).

Panti sosial dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yangmelaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.78

B. Kerangka Pikir

Menurut Usman dan Purmomo Setiady Akbar (2011;34) kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangkaa pikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru

[78]Permensos No 22 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Hipotesis

Adapun hipotesis yang dikemukakan sebagai kesimpulan sementara dari penulis bahwa peranan Dinas Sosial Daerah Provinsi Riau dalam pengawasan panti sosial di kota pekanbaru dapat dikatakan berperan jika seluruh indikator yang dijadikan alat untuk mengukurnya dilaksanakan dengan baik.

D. Konsep Operasional

Konsep menurut Mardalis (2010;45) dimaksudkan untuk menjelaskan makna dan maksud dari teori yang dipakai, atau menjelaskan makna dan maksud dari teori serta menjelaskan kata-kata yang mungkin masih abstrak pengertiannya.

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar genelarisasi dari sejumlah karakteristik kejadian keadaan, kelompok, atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lainnya.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam pemakaian konsep yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian, maka terlebih dahulu penulis akan mengoperasionalkan sesuai dengan penelitian yang terdapat didalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Pengawasan Panti Sosial.
2. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Dinas Sosial yang dimaksud disini adalah DinasSosial Daerah Provinsi Riau.
4. Pengawasan adalah untuk menjamin bahwa kegiatan terarah yang tengah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana dan dalam batas-batas struktur organisasi. Adapun indikator pengawasan merupakan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran hasil pelaksanaan, peniaian hasil pelaksanaan, dan perbaikkan.
5. Panti sosial dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, yang dalam hal ini peneliti mengartikannya sebagai panti sosial anak dan lanjut usia.
6. Lembaga Kesejahteraan Sosial anak adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia atau panti jompo yaitu tempat atau lembaga yang bertanggung jawab untuk merawat dan menampung manula atau manusia lamjut usia.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1: Operasional Variabel Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Mengawasi Panti Sosial di Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
pengawasan adalah untuk menjamin bahwa kegiatan terarah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana dan dalam batas-batas struktur organisasi. (Komaruddin 1992;5)	Peranan Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial	1. Standar	a. Menetapkan alat ukur standar b. Melengkapi sarana dan prasarana c. Menentukan Kapasitas Penghuni Panti	Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan
		2. Pengukuran	a. Melakukan pengawasan langsung atau observasi b. Menerima dan Membuat laporan	Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan
		3. Penilaian	a. Membandingkan pelaksanaan dengan standar b. Memeriksa Kelayakan fisik Panti	Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan
		4. Perbaikan	a. Apabila Terjadi Penyimpangan b. Jika yang sudah diterapkan tidak dilaksanakan c. Evaluasi	Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan

Sumber: Modifikasi Penulis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Teknik Pengukuran

Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan persentase (%) dengan tiga kategori penilaian yakni Berperan, Kurang Berperan, dan Tidak Berperan.

Variabel Penelitian, dikatakan:

Berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan persentase antara 67%-100%.

Cukup Berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan persentase antara 34%-66%.

Tidak Berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan persentase antara 0%-33%.

Pengukuran untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Standar, dikatakan :

Berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan persentase antara 67%-100%.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Cukup Berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan persentase antara 34%-66%.

Tidak Berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan persentase antara 0%-33%.

2. Pengukuran, dikatakan :

Berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan persentase antara 67%-100%.

Cukup Berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan persentase antara 34%-66%.

Tidak Berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan persentase antara 0%-33%.

3. Penilaian, dikatakan :

Berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan persentase antara 67%-100%.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Cukup Berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan persentase antara 34%-66%.

Tidak Berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan persentase antara 0%-33%.

4. Perbaikan, dikatakan:

Berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan persentase antara 67%-100%.

Cukup Berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan persentase antara 34%-66%.

Tidak Berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan persentase antara 0%-33%.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas penelitian ini adalah :

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survey deskripif dan menggunakan metode kuantitatif yang mana penelitian ini menuntut peneliti menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya, penafsiran terhadap data dengan menggunakan angka serta penampilan dari hasilnya dalam bentuk tabel. Selanjutnya untuk menjelaskan isi dari tabel tersebut penulis menggunakan penjelasan data tipe Deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi dan mengenai bidang tertentu, (Azwar,2010;7).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang memiliki tugas yang salah satunya yaitu pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, BidangPerlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, BidangPemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau yaitu dikarenakan penulis masih menemukan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pengawasan panti sosial terkhususnya di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Panti Asuhan) dan Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia (Panti Jompo) di Kota Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek atau elemen yang terdapat dalam suatu penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.Populasi yang dimaksud tersebut yaitu Pegawai Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan juga Pengelola Lembaga Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia.

Lembaga Kesejahteraan Sosial anak atau panti asuhanadalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional. Adapun Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia atau panti jompo yaitu tempat atau lembaga yang bertanggung jawab untuk merawat dan menampung manula atau manusia lanjut usia.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III.1 Populasi dan Sampel TentangPeran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru.

No	Jenis Populasi	Jumlah	
		Populasi	**Sampel**
1.	Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Riau	1	1
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1	1
3.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	1	1
4.	Pegawai Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	5	5
5.	Pengelola Panti Sosial anak dan Panti Sosial Lanjut Usia di Kota Pekanbaru.	19	19
Jumlah		**27**	**27**

Sumber : Modifikasi peneliti 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Berdasarkan pertimbangan penulis dalam menentukan sampel penelitian untukKepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Riau, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, penulis menggunakan teknik penarikan purposive sampling yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan, sedangkan untukPegawai Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usiamenggunakan sensus yaitu penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara dan pedoman kuesioner yang telah disiapkan terlebih dahulu.

b. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang berkenaan dengan peraturan, penjelasan umum, teori-teori dan dokumentasi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan dangan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden/informan, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.[79] Peneliti melakukan pengamatan langsung di Dinas Sosial Provinsi Riau dan Lembaga Kesejahteraan Sosial anak (panti asuhan) dan Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia (panti jompo).Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan.

[79]Syafhendri. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Pemerintaha.*Pekanbaru. Hlm 22

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Kuesioner

Yaitu dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan dengan alternatif jawaban yang disebarkan kepada masyarakat yang dijadikan sampel, setelah diisi/dijawab kuisoner tersebut dikembalikan kepada peneliti sehingga dapat penulis ketahui tentang peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Riau dalam mengawasi panti sosial.

c. Wawancara

Yaitu dengan mewancarai pihak-pihak terkait seperti Pegawai Dinas Sosial Daerah Provinsi Riau, dan Pengelola Lembaga Kesejahteran Sosial Anak dan Lanjut Usia dalam mencari dan mengumpulkan informasi peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Riau dalam mengawasi panti sosial.

d. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil dat-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian melalui penelitian berupa daftar pertanyaan atau kuisoner, selanjutnya dikelompokan dan diolah secara kuantitatif atau pengelompokan dan penyajian data melalui angka-angka berbentuk tabel data tunggal.Kemudian data tersebut diperesentasikan dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dijelaskan serta dianalisa secara deskriptif sesuai dengan data yang didapatkan guna analisa mengenai hasil dari pembahasan penelitian guna mendapatkan hasil penelitian tersebut kemudian diambil kesimpulan dari pembahasan tersebut.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2018-2019																							
		September				Oktober				Januari				Febuari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuesioner																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Tesis)																								
9	Konsultasi Revisi Tesis																								
10	Ujian Komprehensif Tesis																								
11	Revisi Tesis																								
12	Pengadaan Tesis																								

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Perpustakaan Universitas Islam Riau
UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU

BAB IV

LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Pekanbaru

a. Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah.

Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan *terminal* bus antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Hal ini tak lepas dari peran Sultan Siak ke 4 Sultan Alamuddin Syah yang memindahkan pusat kekuasaan Siak dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1762 demi untuk menghindari campurtangan Belanda ke dalam urusan keluarga kerajaan, setelah sebelumnya beliau berhasil menaiki tahta dengan menggeser keponakannnya Sultan Ismail dengan bantuan Belanda. Pekan yang beliau bangun di tempat ini kemudian didukung oleh akses jalan yang menghubungkan dengan daerah-daerah penghasil lada, gambir, damar, kayu, rotan, dan lain-lain. Jalan tersebut menuju ke selatan sampai ke Teratak Buluh dan Buluh Cina dan ke barat sampai ke Bangkinang terus ke Rantau Berangin. Pengembangan pekan ini kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Ali. Di zamannya, pekan baru ini menjadi bandar yang sangat ramai sehingga lama kelamaan nama Pekanbaru lebih dikenal daripada Senapelan. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrikdari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus landschap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokung.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjungpinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Geografi

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan,PadangdanJambi, dengan wilayah administratif, diapi toleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34.1 °C hingga 35.6 °C, dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km², setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

c. Kependudukan

Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan Palembang dan Bandar Lampung.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 40,96% dari total penduduk kota.Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan Bahasa Minangkabau sebagai bahasa pergaulan yang umum digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru, selain Bahasa Indonesia.

Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Batak. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi.

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangannya masyarakat Batak. Pasca PRRI eksistensi kelompok ini makin menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi "Penguasa Perang Riau Daratan".

d. Perekonomian

Saat ini Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan, yaitu dengan nama Pekansikawan, (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,88% dan 0,02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebesar 2,26%, terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2,07% pada bulan Januari 2010 dan 2,14% pada bulan Februari 2010.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekomoni kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya,Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Panam Square, Giant, Transmart Pekanbaru dan Living World. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya.Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Limapuluh dan Pasar Cik Puan.

Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,82 %, dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru.

2. Dinas Sosial

a. Keberadaan Dinas Sosial Provinsi Riau

Dari catatan sejarah dapat diungkap bahwa Instansi Sosial lahir dua hari setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, bersamaan dengan lahirnya beberapa instansi. Pada mulanya instansi sosial dinamakan Kementrian Sosial, yang kemudian diganti dengan nama Djawatan. Tahun 1947, dengan keputusan Presiden RI no. 44 Tahun 1947 Tentang Susunan Umum Pemerintahan dan Departemen, kemudian diubah menjadi Departemen Sosial sampai dengan tanggal 26 Oktober 1999. Sejak berdiri sampai dengan perkembangan terakhir, instansi sosial memegang peranan penting, mulai dari hal mengatasi masalah sosial disaat perang, cacat, korban kerusuhan, dan pada saat mempertahankan kemerdakaan. Selain hal itu juga pelayanan dapur umur, yang menjadi embrio lahirnya Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional pada tanggal 20 Desember 1949. Kemudian tugas-tugas Instansi Sosial dilengkapi dengan penanganan masalah transmigrasi dan perumahn, serta melanjutkan/pengembalian orang terlantar. Dalam pembangunan nasional selama ini, masalah sosial yang menjadi sasaran pelayanan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 24/HUK/1997 Tentang Sistem Pembangunan Kesejahteraan Sosial terdiri dari dua hal, yaitu penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terdiri dari 21 jenis serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Provinsi Riau berada dalam kawasan kerjasama Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura growth Triangel (IMS-GT). Posisi penting tersebut akan terus disandang oleh Provinsi Riau, seiring dengan perkembangna pasar bebas ASEAN pada tahun 2003 dan pasar bebas Asia Pasific pada tahun 2020 mendatang. Kemajuan pembangunan kawasan-kawasan industri memang menampakan hasil yang menggembirakan. Namun di sisi lain telah menimbulkan dampak sosial serta kesenjangan dalam masyarakat.

Dalam rangka penangan masalah kesejahteraan sosial, keberadaan Dinas Sosial Provinsi Riau telah dirasakan manfaatnnya oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ada di Provinsi Riau. Dinas Sosial telah menargetkan penanganan PMKS sebanyak 34.602 jiwa, dan telah dapat ditangani sampai tahun 1989/1999 adalah sebanyak 23.671 jiwa.

Adapun pembinaan terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial sebanyak 570 Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat/ relawan Sosial dan 546 organisasi sosial (Karang Taruna /Orsos).Penanganan tersebut dilaksanakan oleh pemerintaha (Departemen Sosial), Pemda/Instansi terkait dan masyarakat.

Selain daripada itu, salah satu pembinaan yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Departemen Sosial di Provinsi Riau adalah melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan ebrbagai jenis dan kerajinan yang tersebar di 12 (tujuh) Kabupaten/Kotamadya di Provinsi Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Sejarah berdirinya Dinas Sosial Provinsi Riau

Sebelum ibukota Provinsi Riau ditetapkan di Pekanbaru, Ibukota Provinsi ini terlietak di Tanjung Pinang. Pada saat itu semua Jawatan atau Dinas Tingkat I berpusat di Tanjung Pinang, termasuk juga Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau, Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau sewaktu berpusat di Tanjung Pinang bernama Jawatan Sosial yang didirikan pada tahun 1961. Sewaktu Ibukota Provinsi Riau dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, termasuk Jawatan Sosial pada Tahun 1963.

Tahun 1974 Jawatan Sosial diubah namanya menjadi kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau. Pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau dilakukan PT. GIAM RIAU, mulai tanggal 10 Novembew 1975 sampai 10 Juni 1976, dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 25 Juni 1976 dan Menteri Sosial RI yang pada waktu itu diajabat oleh HMS. Mentareja SH, sedangkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau pada saat itu adalah H.Abdul Karim Said.

Krisis moneter yang terjadi bulan juli 1997. pemerintahan menghadapi masalah yang kian besar, masalah kemiskinan dan pengangguran yang menuntut pemerintahan untuk bekerja keras. Gejolak ini membawa implikasi dengan dilaksanakanya Sidanh Istimewa MPR pada bulan November 1988 yang menghasilkan 12 ketetapan. Kabinet Reformasi melaksanakan kegiatannya segera setelah pemerintahan baru terbentuk. Berbagai Departemen dituntut untuk memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat. Salah satu bentuk dari kerja

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keras ini antara lain memunculkan program yang terkenal dengan istilah Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam era reformasi Departemen Sosial menetapkan 3 program pokok, yakni Program Penyelamatan, Reguler dan Pemberdayaan. Melaksankan pemilihan umum secara LUBER, JURDIL, pada tanggal 7 Juli 1999 yang dapat berjalan lancar.

Pembentukan MPR RI dan DPR RI. Kemudian dilaksanaka Sidang Umum MPR dari tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 1999 yang antara lain memilih Presiden dan Wakil Presiden. Terpilihnya Prof. DR. Amien Rais Sebagai Ketua MPR, Ir. Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR, KH. Abdurachman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden. Tanggal 26 Oktober 1999, pengumuman susunan kabinet Persatuan Nasional yang terdiri dari 35 Menteri sebagai pembantu Presiden, dan Departemen Sosial tidak termasuk dalam susuna kabinet. Pada tanggal 26 oktober 1999, Sekretaris Jenderal Departemen Sosial diwawancarai oleh TVRI, yang menyatakan bahwa Departemen Sosial berada pada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengatasan Kemiskinan. Pada tanggal 26 Oktober 1999 para Kakanwil dan Eselon II di Pusat, diundang oleh Bapak Sekjen guna perpisahan dengan Ibu Menteri Sosial Prof. DR. Ir. Yustika S Baharsjah, M.Sc. dan penyampaian ketidakberadaan Departemen Sosial dan penyusunan Kabinet tersebut.

Pada tanggal 27 Oktober 1999 para Esselon I dan para pakar sosial diterima oleh Presiden RI guna menyampaikan agar Departemen Sosial tetap eksis. Namun Bapak Presiden tetap pada pendiriannya dan aspirasi tersebut diteruskan melalui Ketua DPR RI , yang kemudian para Kakanwil di daerah dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyampiakannya pada tanggal 28 Oktober 1999 pagi hari sebelum pukul 12.00 WIB. Pada tanggal 28 Oktober 1999 pukul 08.15, seluruh karyawan/karyawati Departemen Sosial, Depsos Kodya Pekanbaru, UPT, menyampaikan aspirasinya ke DPR Provinsi Riau tentang beberapa hal, kemudian dilanjutkan kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI pusat agar Departemen Sosial tetap eksis.

DPR RI menjanjikan akan menyampaikan hal tersebut kepada Presiden RI, dan direncanakan pertemuan DPR RI dengan Presiden adalah tanggal 15 November 1999. Sidang paripurna DPR RI baru dapat dilaksanakan pada tanggal 18 November 1999 dengan acara pokok mendengarkan penjelasan Presiden mengenai likuidasi Presiden tetap berpendirian bahwa Departemen Sosial dan Depertemen Penerangan tidak perlu ada dalam sususan Kabinet Persatuan Nasional.

Dengan surat Sekretaris Jendral Departemen Sosial tanggal 30 Oktober 1999 Nomor : K/HUK/45 bahwa para Kakanwil Departemen Sosial tetap melaksanakan kegiatan sampa dengan Maret 1999. Sebagai solusi alternatif, untuk tingkat pusat tugas pokok dan fungsi Departemen Sosial dilaksanakan oleh Menteri Negara Urusan Masalah Kemasyarakatan dan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN), sedangkan ditingkat daerah Tingkat I, diperbantukan PEMDA TINGKAT I. Keputusan Presiden Republuk Indonesia Nomor 152 Tahun 1999 Tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI nomor K/515/SJ/XI/1999, Kepada Gubernur KDH Tk. I se-Indonesia, Tanggal 26 November 1999, perihal Permohonan untuk tetap memfungsikan Kanwil Depsos sampai dengan akhir Maret Tahun 2000.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada tahun 2000, Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau menjadi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau. Berdasarkan Perda No. 31 tahun 2001 Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau berubah menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut panti sosial dipimpin oleh seorang Kepala tanpa jabatan struktural.

Berdasarkan Perda No. 9 tahun 2008 Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau berubah menjadi Dinas Sosial Provinsi Riau, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau Perda Nomor 4 Tahun 2016 Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Pergub Riau Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau .

c. Struktur Dinas Sosial

1. Kepala Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernurmelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerahdan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidangSosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan,pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikanoleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Sosial.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi danevaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan,Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan SubbagianKepegawaian dan Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional padaSekretariat;
b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasilpelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada KepalaDinas Sosial; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baiklisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugasmelakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi PerlindunganSosial Korban Bencana Alam, Seksi Perlindungan Sosial KorbanBencana Sosiai, dan Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i)Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. penyrusunan program kerja dan rencana operasional pada BidangPerlindungan dan Jaminan Sosial;
b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasilpelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan dan JaminanSosial;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada KepalaDinas Sosial; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuaitugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tuigas melakukankoordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anakdan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, SeksiRehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud plda ayat (1)Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada BidangRehabilitasi Sosial;
b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi danpelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Rehabilitasi Sosial;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada KepalaDinas Sosial; danpelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuaitugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukankoordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pemberdayaan Perorangandan Keluarga, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan KelembagaanSosial, Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan danRestorasi Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada BidangPemberdayaan Sosial;
b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasilpelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada KepalaDinas Sosial; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuaitugas dan fungsinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukankoordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Identifikasi danPengolahan Data Fakir Miskin, Seksi Pendampingan danPemberdayaan, Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada BidangPenanganan Fakir Miskin;
b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada KepalaDinas Sosial; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuaitugas dan fungsinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Bagan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Riau

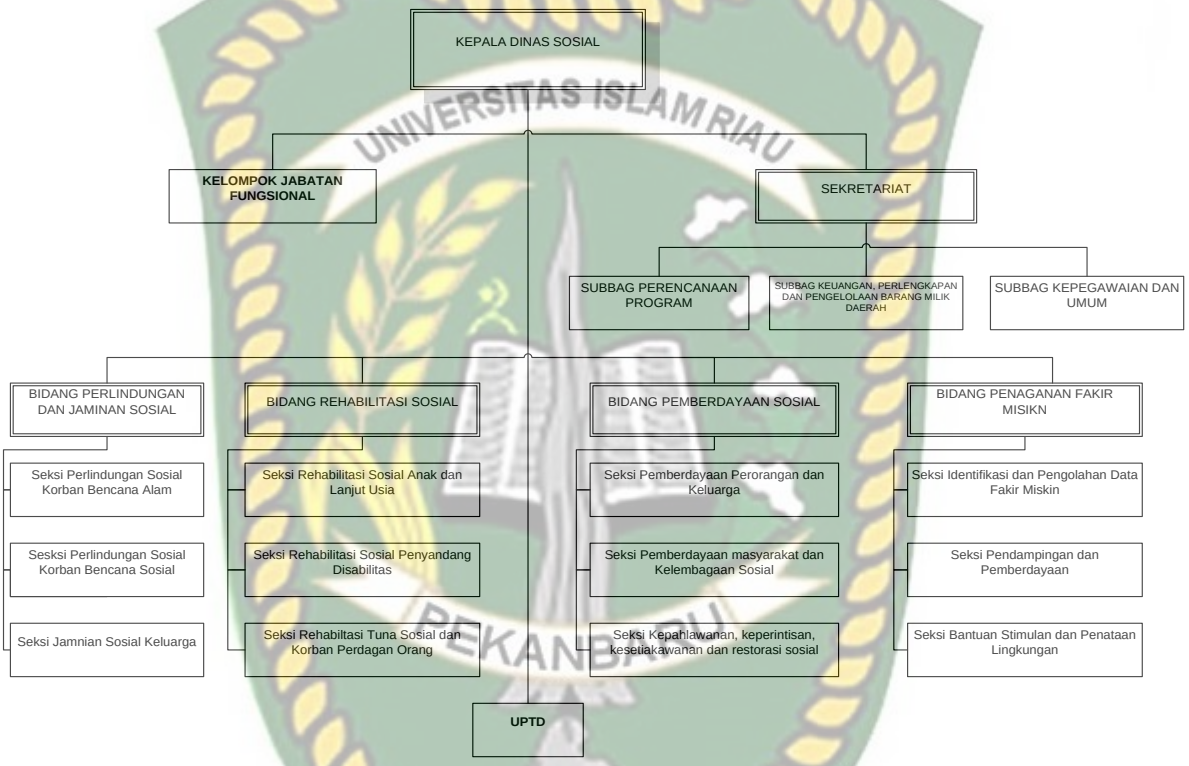

Gambar IV. 1: Bagan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Identitias Responden

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut terlebih dahulu penulis akan menyajikan komposisi responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan 27 responden yang kemudian dijadikan sumber informasi untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru.

Untuk keperluan penelitian, penulis menyajikan responden yang mana respondennya yaitu Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia, Pegawai Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dan Pengelola Panti Asuhan dan Panti Jompo Kota Pekanbaru.

1. **Jenis Kelamin Responden**

Jenis kelamin responden dalam penelitian dapat dilihat dari table berikut:

Tabel IV.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentasi
Laki-laki	9	33%
Perempuan	18	67%
Jumlah	**27**	**100%**

Sumber: Data Penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis kelamin responden yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 9 orang atau 33% berjenis kelamin laki-laki dan 18 orang atau 67% berjenis kelamin perempuan, dan demikian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jumlah responden perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden laki-laki.

2. Usia Responden

Faktor usia sangat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan.Tingkat usia akan memberikan pengaruh, bahkan juga mempengaruhi pola pikir dan standar kemampuan fisik.

Kelompok umur atau golongan usia para responden yang sudah terpilih yaitu sebanyak 27 orang responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.2 Responden Berdasarkan Usia

Kelompok Usia	Frekuensi	Persentasi
≤20 Tahun	-	0%
21-30 Tahun	7	26%
31-40 Tahun	15	56%
≥40 Tahun	5	18%
Jumlah	**27**	**100%**

Sumber : Data Penelitian

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa usia responden yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 7 orang atau 26% pada usia 21-30 tahun, 15 orang atau 56% berusia 31-40 tahun, dan 5 orang atau 18% berusia lebih dari 40 tahun. Dengan demikian usia responden di dominasi pada usia 31-40 tahun.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	19	70%
4	DIPLOMA	1	4%
5	S1	5	18%
6	S2	2	7%
7	S3	-	-
Jumlah		**27**	**100%**

Sumber: Data Penelitian

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari 19 orang atau 70% berpendidikan SMA, 1 orang atau 4% berpendidikan Diploma, 5 orang atau 18% berpendidikan S1, dan 2 orang atau 7% berpendidikan S2.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan dan hasil kuesioner, peneliti melihat bahwa mayoritas tingkat pendidikan pengurus panti berada pada tingkatan SMA, sementara untuk mayoritas tingkat pendidikan pegawai Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau berada pada tingkatan Strata Satu (S1).

C. Hasil Penelitian

Untuk melihat bagaimana peran dinas sosial pemerintah daerah Provinsi Riau dalam pengawasan panti sosial di Kota Pekanbaru, maka penulis akan menganalisnya dengan menggunakan teori dari Komaruddin (1992;5), yang mana menurut beliau pengawasan adalah untuk menjamin bahwa kegiatan terarah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana dan dalam batas-batas struktur organisasi. Adapun indikator pengawasan merupakan pengembangan standar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaksanaan, pegukuran hasil pelaksanaan, penilaian hasil pelaksanaan, dan perbaikan.

Ada banyak alasan mengapa pengawasan penting dan dibutuhkan. Alasan sangat fundamental dan universal mengapa pimpinan membutuhkan pengawasan adalah kebutuhan memonitor apa yang orang atau unit organisasi sedang dikerjakan dan secara khusus hasil dari apa yang mereka kerjakan. Alasan lain adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang dihadapi oleh organisasi dan pimpinan. Pengawasan sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengamati daan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

1. Standar

Ketika pengawasan berlangsung, kegiatan pertama yang perlu dilakukan adalah pengembangan standar, Pelaksanaan dengan cara menetapkan alat alat pengukur sehingga kita dapat menilai setiap pelaksanaan yang sedang atau sudah selesai. Standar yang objektif dan cermat dan serasi dengan keadaan yang khusus harus ditetapkan. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat tentang bagaimana peran dinas sosial dalam menyusun standar untuk panti sosial.

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor : 3401/BSN/HK.71/11/2001 tentang Sistem Standardisasi Nasional).

Adapun sub indikator dari pelaksanaan standar ini yaitu bagaimana peran dinas sosial dalam menetapkan standar panti, menetukan sarana dan prasarana serta menentukan kapasitas penghuni panti.

Tabel IV.4 : Tanggapan Responden Untuk Sub Indikator Standar

No	Sub Indikator	Kategori Penelitian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menetapkan alat ukur standar	19 (70%)	8 (30%)	0 (0%)	27
2	Melengkapi sarana dan prasarana	11 (41%)	16 (59%)	0 (0%)	27
3	Menentukan Kapasitas Penghuni Panti	23 (85%)	4 (15%)	0 (0%)	27
Jumlah		**53**	**28**	**0**	**81**
Rata-rata		**18**	**9**	**0**	**27**
Persentase		**67%**	**33%**	**0%**	**100%**

Sumber: Data Penelitian

Berdasarkan jawaban dari responden diatas dapat dilihat bahwa Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru pada indikator standar didapatkan nilai tertinggi 67% dan berada dalam kategori baik. Dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Riau memiliki peran yang baik dalam menetapkan standar untuk panti sosial, mengawasi kelengkapangan sarana dan prasarana serta menentukan kapasitas penghuni panti sosial di Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satupegawai dinas sosial tanggal 14 Oktober 2018, bahwa:

"Untuk menetapkan standar panti kami mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik IndonesiaNomor 22 Tahun 2016Tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial, yang mana didalam Peraturan tersebut menjelaskan tentang standar yang harus di miliki panti".

Standar minimum sarana dan prasarana panti sosial menurut peraturan tersebut meliputi:

a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;

b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian;

c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;

d. tenaga pelayanan panti sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis;

f. alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan

g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Ukuran normatif dari indikator standar diatas yaitu apabila semua indikator tersebut sudah terpenuhi secara cukup dan layak.

Ketika penulis menanyakan kepada pengelola panti sosial pada tanggal 9 November 2018 tentang bagaimana tanggapannya tentang standar sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh panti sosial, tanggapannya yaitu:

"Kami sudah berusaha untuk mengikuti standar yang sudah ditetapkan pemerintah, namun kami merasakan bahwa standar yang ditetapkan tersebut dirasakan cukup tinggi sehingga memberatkan kami, karena untuk mengikuti standar tersebut perlu biaya yang cukup besar, sementara itu kami juga harus memikirkan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penghuni panti".

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada pengelola panti sosial "bagaimanakah peran Dinas Sosial dalam mentapkan kapasitas penghuni panti sosial dan dari mana saja asal penghuni panti sosial tersebut?"

"Untuk mentapkan kapasitas jumlah penghuni panti, Dinas Sosial memberikan kewenangan kepada pengelola panti untuk menentukan jumlah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penghuni pantinya, dan untuk penghuni panti sendiri selain diambil dari lingkungan sekitar, kebanyakan penghuninya berasal dari luar daerah seperti dari kabupaten palalawan, kabupaten siak, dan kabupaten kampar. Penghuni panti tersebut sengaja dititipkan oleh keluarga mereka di panti asuhan kami".

Jika dilihat dari teori pelaksanaan standar yaitu pelaksanaan dengan cara menetapkan alat alat pengukur sehingga kita dapat menilai setiap pelaksanaan yang sedang atau sudah selesai, maka dalam hal ini peneliti melihat bahwa peran dinas sosial dalam membuat standar dikatakan belum terlaksana dengan baik, karena dinas sosial sendiri belum membuat standar panti sosial dan hanya mengacu kepada aturan Peraturan MenteriSosial Republik IndonesiaNomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial, yang mana dalam peraturan tersebut hanya menjelaskan aturan standar secara umum yang diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia.Dalam lampiran peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa penggunaan standar nasional Lembaga Kesejahteran Sosial di peruntukan agar Pemerintah dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota), sebagai pembuat kebijakan, agar memiliki acuan dalam upaya mendukung peningkatan kualitas kelembagaan dan pelayanan LKS.

Kebutuhan panti di setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu seharusnya dinas sosial membuat standar aturan khusus untuk mengatur panti sosial dengan menyesuaikan dan mengkaji kondisi wilayah dan kebutuhan yang harus di miliki panti sosial tersebut. Dengan demikian standar tersebut bisa di terapkan dengan baik oleh panti-panti sosial yang ada di provinsi riau terkhususnya di kota pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari observasi peneliti dilapangan, peneliti masih menemukan panti yang kurang memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Terkhususnya pada standar sarana dan prasarana yang dimiliki panti. Seperti disalah satu panti sosial yang penulis datangi yaitu Panti Asuhan Istiqlal yang beralamatkan di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, dimana panti asuhan tersebut memiliki jumlah penghuni yang cukup banyak yaitu berjumlah 51 orang anak. Namun demikian kondisi fisik dari bangunan tersebut kurang memadai dimana bangunan panti tersebut memiliki bagunan yang tidak terlalu besar dan hanya memiliki dua ruangan yang terbagi atas ruangan untuk laki-laki dan ruangan untuk perempuan. Jika mengikuti acuan ukuran normatif dari indikator standar yang sudah ditetapkan didalam Peraturan MenteriSosial Republik IndonesiaNomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial, dimana ukuran normatifnya yaitu sarana dan prasarana yang sudah ditentukan terpenuhi secara cukup dan layak, maka penulis beranggapan bahwa panti tersebut belum memenuhi standar minimum sarana dan prasarana karena sarana dan prasarana yang dimiliki oleh panti asuhan tersebut tidak cukup dan tidak layak untuk menampung jumlah penghuni panti yang cukup banyak.

2. Pengukuran

Pengukuran hasil pelaksanaan yang merupakan kegiatan menetapkan status pelaksanaan yang sedang dan telah selesai dilaksanakan. Pengukuran ini dapat dilakukan bilamana para pengawas mengadakan observasi, menerima dan membuat laporan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kartini Kartono mendefinisikan Observasi sebagai pengujian dengan maksud atau tujuan tertentu mengenai sesuatu, khususnya dengan tujuan untuk mengumpulkan fakta, satu skor atau nilai, satu verbalisasi atau pengungkapan dengan kata-kata segala sesuatu yang telah diamati.

Kegiatan Observasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kehidupan sosial yang sulit diketahui dengan metode-metode lainnya. Observasi yang di lakukan akan dapat memberikan kejelasan tentang tentang sebuah permasalah dan kemudian mencari solusi untuk masalah tersebut. Observasi yang dilakukan bertujuan guna mendapatkan data-data konkret di lapangan.

Adapun sub indikator dalam pengukuran ini yaitu bagaimana peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam melakukan observasi atau pengawasan langsung ke panti sosial, dan menerima serta membuat laporan.

Tabel IV.5 : Tanggapan Responden Untuk Sub Indikator Pengukuran

No	Sub Indikator	Kategori Penelitian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melakukan pengawasan langsung atau observasi	16 (59%)	11 (41%)	0 (0%)	27
2	Menerima dan Membuat laporan	18 (67%)	9 (33%)	0 (0%)	27
Jumlah		**34**	**20**	**0**	**54**
Rata-rata		**17**	**10**	**0**	**27**
Persentase		**63%**	**37%**	**0%**	**100%**

Sumber: Data Penelitian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan jawaban dari responden diatas dapat dilihat bahwa Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru pada indikator pengukuran didapatkan nilai tertinggi 63% dan berada pada kategori baik. Dalam hal iniDinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau cukup berperan dalam melakukan pengawasan langsung dan menerima serta membuat laporan.

Menurut salah satu pegawai Dinas Sosial Provinsi Riau ketika ditanyakan "bagaimanakah peran dinas sosial dalam melakukan pengawasan panti sosial?". Adapun jawaban pegawai tersebut:

"Kamidinas sosial provinsi riau akan turun langsung kelapangan untuk mengawasi panti jika ada pemberian dan penyerahan bantuan dana oleh dinas sosial dan lembaga lainnya. Namun demikian, kami juga akan turun kelapangan jika ada pengaduan dan laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh panti sosial, oleh karena itu kami mengaharapkan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat untuk membantu dinas sosial dalam melakukan kegiatan pengawasan kepada panti-panti yang ada".

Berdasarkan Peraturan MenteriSosial Republik IndonesiaNomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial,Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatanLembaga Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut:

a. Pemerintah oleh Menteri;
b. Provinsi oleh gubernur; dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Kabupaten/Kota oleh bupati/walikota.

Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk melaksanakan pangawasan terhadap kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berada di lingkup wilayahnya. Pengawasan masyarakat dapat dilaksanakan dalam bentuk pangaduan oleh masyarakat terhadap kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Adapun tanggapan salah satu pengelola panti sosial ketika ditanyakan pertanyaan yang sama yaitu:

"Pengawasan yang dilakukan oleh dinas sosial sudah berjalan baik. dimana dalam setahun dinas sosial turun kelapangan untuk mengawasi panti secara langsung sebanyak dua kali, bahkan terkadang dinas sosial melakukan kunjungan atau sidak mendadak".

Kegiatan pengawasan secara langsung merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pengawasan karena dengan melakukan pengawasan secara langsung akan dapat terlihat apakah kinerja yang sudah direncanakan sebelumnya sudah berjalan dengan semestinya, sebagaimana yang di kemukakan oleh Ibrahim (dalam Fathoni, Abdurrahmat, 2009), "pengawasan merupakan kegiatan manajer agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki".

Dengan melakukan pengawasan secara langsung juga dapat melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga dengan mengetahui

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

permasalahan tersebut akan dengan mudah untuk mencari solusi terbaik dan tepat sasaran.

Dalam melakukan pengawasan dibutuhkan sumber daya manusia yang dalam hal ini pegawai yang bertugas turun langsung kelapangan untuk melakukan pengawasan. Adapun pegawai pegawai yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan yaitu seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia yang hanyaberjumlah 5 (lima) orangPelaksana Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia. Tentu hal ini berbanding terbalik dengan wilayah Provinsi Riau yang cukup luas yaitu 88.672,67 Km^2. Ditambah lagi jumlah panti sosial yang ada di Provinsi Riau cukup banyak yaitu berjumlah 93 panti sosial. Seharusnya dengan luas wilayah yang cukup luas dan jumlah panti yang cukup banyak, maka sangat perlu untuk menambah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sehingga pengawasan dapat terlaksana dengan maksimal.

Menurut hasil observasi, peneliti menilai bahwa pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau terkhususnya di Kota Pekanbaru sudah berjalan cukup baik, namun demikian untuk dalam membuat laporan dan pendataanyang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau belum berjalan dengan maksimal. Adapun alasan peneliti mengatakan bahwa dalam membuat laporan dan pendataan belum maksimal yaitu ketika peneliti melakukan observasi dilapangan, peneliti menemukan beberapa panti yang tidak ada didalam daftar panti sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau kepada peneliti. Padahal panti-panti tersebut memiliki izin beroperasi dan memiliki lokasi yang berada di tengah masyarakat.Adapun nama-nama panti yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak masuk kedalam data yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau yaitu Panti Asuhan Bintang Kasih yang beralamat di Jl. Hang Tuah ujung, Panti Asuhan AL-ikhlas yang beralamat di Jl. Kapau Sari, dan Panti Asuhan Amanah yang beralamat di Jl. Banda Aceh. Dalam hal ini penelti menilai bahwa dinas sosial kurang meng-update dan memperbaharui data-data terbaru panti sosial, sehinga panti-panti yang sudah memiliki izin tersebut tidak masuk kedalam data Dinas Sosial Provinsi Riau.

3. Penilaian

Penilaian hasil pelakasanaan dilakukan denga cara membandingkan pelaksanaan dengan standar yang ada. Penilaian adalah kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran. Menurut Suharsimi Arikunto penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk.

Dalam hal ini sub indikator dari penilian yaitu bagaimana peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam membandingkan pelaksanaan dengan standar yang sudah ditetapkan, dan juga bagaiamana peran dinas sosial dalam memeriksa kelayakan fisik panti sosial.

Tabel IV.6 : Tanggapan Responden Untuk Sub Indikator Penilaian

No	Sub Indikator	Kategori Penelitian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Membandingkan pelaksanaan dengan standar	17 (63%)	10 (37%)	0 (0%)	27
2	Memeriksa Kelayakan fisik Panti	14 (52%)	13 (48%)	0 (0%)	27

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jumlah	**31**	**23**	**0**	**54**
Rata-rata	**16**	**11**	**0**	**27**
Persentase	**59%**	**41%**	**0%**	**100%**

Sumber: Data Penelitian

Berdasarkan jawaban dari responden diatas dapat dilihat bahwa Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru pada indikator penilaian didapatkan nilai tertinggi 59% dan berada pada kategori baik. Dalam hal ini Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau sudah cukup berperan dalam membandingkan pelaksanaan dilapangan dengan standar yang ada serta dalam memeriksa kelayakan fisik panti sosial.

Dari wawancara peneliti dengan salah satu pegawai dinas sosial, ketika ditanyakan tentang "bagaimana peran dinas dalam membandingan antara pelaksanaan di lapangan dengan standar yang sudah ditetapkan?". Adapun jawaban dari pegawai tersebut yaitu:

"Dalam pelaksanaan dilapangan ketika dinas sosial menemukan panti sosial yang tidak mengikuti standar yang sudah ditetapkan maka dinas sosial akan memberikan teguran kepada panti sosial tersebut agar untuk mengikuti standar yang sudah diatur dan jika tetap tidak mengikuti maka Dinas Sosial akan memberi sanksi yang tegas yang bisa berupa pencabutan izin beroperasi terhadap panti yang bersangkutan".

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial yang telah terdaftar diwajibkan menyampaikan laporan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tahunan kepada instansi/dinas sosial kabupaten/kota. Apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut Lembaga Kesejahteraan Sosial tidak menyampaikan laporannya, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial tersebut akan dinyatakan tidak aktif. Untuk mengaktifkan kembali, Lembaga Kesejahteraan Sosial diwajibkan melakukan pendaftaran seperti halnya Lembaga Kesejahteraan Sosial baru.

Adapun ketika peneliti menanyakan kepada salah satu pengelola panti sosial "bagaimana peran dinas sosial dalam memeriksa kelayakan fisik dari bangunan panti?". Pengelola panti tersebut mengatakan:

"Dalam memeriksa kelayakan fisik panti, dinas sosial sangatlah ketat. Dinas sosial meminta agar panti harus mengikuti aturan yang sudah berlaku, dan kami akan mendapatkan teguran jika kami tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan".

Dari observasi peneliti dilapangan, peneliti melihat bahwa panti-panti sosial yang ada di pekanbaru memiliki kondisi yang cukup baik. Namun demikian peneliti juga masih menemukan ada panti yang memiliki kondisi yang kurang baik dan tidak terurus seperti yang peneliti jelaskan sebelumnya.Jika kita membandingkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Daerah Provinsi Riau dengan teori Irawan Soejito yang mengatakan:

"pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak"

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Maka peneliti melihat pengawasanyang dilakukan oleh dinas sosial belum berjalan dengan maksimal, dimana dalam hal ini kondisi dilapangan tidak sesuai dengan kenyataan yang di ungkapkan oleh pegawai dinas sosial dimana mereka mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pengawasan terhadap kondisi fisik bangunan panti sosial, namun kenyataan dilapangan masih ditemukan panti yang kondisi fisiknya tidak memenuhi standar dan tidak layak.

4. Perbaikan

Tindakan perbaikan ini dilakukan apabila, proses dan hasil kerja terdapat penyimpangan dari standar yang ditentukan, akan tetapi apabila proses dan hasil kerja telah sesuai dengan standar maka yang harus dilakukan adalah peningkatan. Tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan harus dibuatkan skala prioritas dalam penanganannya.

Adapun sub indikator perbaikan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran dinas sosial pemerintah daerah provinsi riau dalam menangani penyimpangan yang dilakukan oleh panti sosial, dan juga bagaimana peran dinas sosial dalam menangani panti yang tidak mengikuti standar yang sudah ditetapkan. Serta peran dinas sosial dalam mengevaluasi hasil dari pengawasan tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV.7 : Tanggapan Responden Untuk Sub Indikator Perbaikan

No	Sub Indikator	Kategori Penelitian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Apabila Terjadi Penyimpangan	19 (70%)	8 (30%)	0 (0%)	27
2	Jika yang sudah diterapkan tidak dilaksanakan	19 (70%)	8 (30%)	0 (0%)	27
3	Evaluasi	20 (74%)	7 (26%)	0 (0%)	27
Jumlah		**58**	**23**	**0**	**81**
Rata-rata		**19**	**8**	**0**	**27**
Persentase		**70%**	**30%**	**0%**	**100%**

Sumber: Data Penelitian

Berdasarkan jawaban dari responden diatas dapat dilihat bahwa Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial di Kota Pekanbaru didapatkan nilai tertinggi 70% dan berada pada kategori baik. Dalam hal ini Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau sudah berperan dalam menangani kegiatan penyimpangan yang dilakukan oleh panti sosial, dan melakukan evaluasi pengawasan panti sosial.

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai dinas sosial ketika ditanyakan tentang "bagaimana peran dinas sosial dalam menanggapi penyimpangan yang dilakukan oleh panti sosial dan apakah setelah melakukan pengawasan terhadap panti sosial dilakukan evaluasi?". Adapun jawaban dari pegawai tersebut yaitu:

" jika ditemukan panti sosial yang kedapatan melakukan penyimpangan ataupun tidak mengikuti standar yang ada, maka dinas sosial akan memberikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

peringatan kepada panti tersebut, dan jika panti tersebut tidak mampu untuk membenahi atau memperbaiki kesalahan dan penyimpangan maka dinas sosial akan mengambil tindakan tegas untuk mencabut izin beroperasi panti tersebut. Adapun untuk evaluasi dilakukan secara rutin oleh dinas sosial provinsi riau setelah melakukan pengawasan langsung terhadap panti sosial".

Evaluasi yaitu proses dalam menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dari pengertian evaluasi tersebut maka evaluasi menjadi sangat penting dilakukan dalam pengawasan, karena dengan melakukan evaluasi akan dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan.Pengawasan dan evaluasi diibaratkan sebagai satu keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Maksudnya yaitu pengawasan tanpa evaluasi maka tidak akan terlaksana dengan baik karena tidak adanya pedoman yang digunakan dalam pengawasan. Begitu juga sebaliknya jika evaluasi tanpa pengawasan maka tidak diketahui sampai mana rencana yang sudah dijalankan.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana Panti Sosial Yayasan Tunas Bangsa masih bisa beroperasi, padahal izin dari panti tersebut sudah habis di tahun 2011. Jawaban dari pegawai dinas sosial yaitu:

"kami sudah mencabut izin dari Yayasan Tunas Bangsa karena panti tersebut tidak melakukan perpanjangan izin kepada dinas sosial. Namun yayasan tersebut diam-diam tetap melukan aktivitas seperti biasa. Dan masyarkat tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ada memberikan laporan kepada pihak dinas sosial sehingga kami tidak mengetahui kalau panti tersebut beroperasi secara diam-diam."

Melihat jawaban yang diberikan oleh dinas sosial dalam melakukan evaluasi setelah kegiatan pengawasan, maka kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan-penyimpang yang dilakukan oleh panti sosial sangat kecil. Namun pada kenyataannya masih terjadi kasus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh panti sosial seperti kasus kematian salah satu penghuni panti asuhan yang dikelola oleh yayasan tunas bangsa, yang mana panti tersebut tidak melakukan perpanjangan izin beroperasi dari tahun 2011. Jika dinas sosial melakukan evaluasi secara rutin setelah melakukan pengawasan, maka pelanggaran yang dilakukan oleh panti sosial tersebut seharusnya tidak akan terjadi, karena jika panti yang tidak memperpanjang izin maka akan di beri sanksi dan pencabutan izin beroperasi. Dalam hal ini peneliti menilai bahwa evaluasi yang dilakukan oleh dinas sosial masih belum berjalan dengan maksimal sehingga masih ditemukan pelanggaran-pelangaran yang dilakukan oleh panti sosial.

D. Analisis Data

Untuk selanjutnya penulis akan paparkan secara keseluruhan mengenai rekapitulasi jawaban responden tentang Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV.8: Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Tentang Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial di Kota Pekanbaru

No	Indikator	Item yang dinilai	Kategori Jawaban			
			Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Standar	Menetapkan alat ukur standar	19	8	0	27
		Melengkapi sarana dan prasarana	11	16	0	27
		Menentukan Kapasitas Penghuni Panti	23	4	0	27
2	Pengukuran	Melakukan pengawasan langsung atau observasi	16	11	0	27
		Menerima dan Membuat laporan	18	9	0	27
3	Penilaian	Membandingkan pelaksanaan dengan standar	17	10	0	27
		Memeriksa Kelayakan fisik Panti	14	13	0	27
4	Perbaikan	Apabila Terjadi Penyimpangan	19	8	0	27
		Jika yang sudah diterapkan tidak dilaksanakan	19	8	0	27
		Evaluasi	20	7	0	27
Jumlah			**176**	**94**	**0**	**270**
Rata-rata			**18**	**9**	**0**	**27**
Persentase			**67%**	**33%**	**0%**	**100%**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan rekapitulasi data terhadap responden yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Pegawai Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, dan Pengelola Panti Sosial Anak dan Lanjut Usia di Kota Pekanbaru, dengan melihat hasil jawaban dari indikator-indikator pengawasan maka hasil dari rekapitulasi data tersebut didapat nilai tertinggi 67% dan berada kategori baik.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwaDinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau sudah **Berperan** Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru.

Konsep pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemerikasaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya.“ Dalam ilmu manjemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen”. Dari fungsi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai:

> “*pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana peraturan”.* Atau
>
> *“suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang terlah*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terjadi dapat segala diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya".

Dari konsep diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan intruksi-intruksi sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Dengan melaksanakan pengawasan dapat mengetahui atau mencegah penyimpangan-penyimpangan dari pemanfaatan sumber-sumber dana pelaksanaan kegiatan, dan apabila terjadi penyimpangan dari apa yang direncanakan maka dapat dilakukan tindakan perbaikan.

Adapun hasil dari observasi peneliti dilapangan, peneliti melihat bahwa kinerja dari dinas sosial dalam melakukan pengawasan terhadap panti sosial di kota pekanbaru sudah berjalan cukup baik, namun demikian peneliti masih menemukan beberapa kekurangan-kekurangan yang mana diantaranya yaitudalam melakukan penelitian di kantor dinas sosial provinsi riau, penulis tidak ada menemukan SOP tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan langsung terhadap panti sosial. Dengan adanya SOP tentunya akan membuat pelaksanaan pengawasan menjadi lebih teratur dan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan, seperti yang dikatakan olehKomaruddin (1992;5), yang mengatakan:

"*pengawasan adalah untuk menjamin bahwa kegiatan terarah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana dan dalam batas-batas struktur organisasi"*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kemudian penulis juga melihat bahwa dalam melakukan pendataan dan pelaporan, dinas sosial kurang meng-update data-data terbaru sehingga panti sosial yang sudah memliki izin tidak masuk kedalam data dinas sosial.

Peneliti juga melihat sumber daya manusia yang dimiliki oleh dinas sosial terkhususnya di Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan lanjut Usia kurang memadai, yang mana jumlah pegawai Pelaksana Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usiahanya berjumlah 5 (lima) orang. Sementara yang kita ketahui Provinsi Riau memiliki wilayah geografi yang cukup luas yaitu 88.672,67 Km^2, ditambah lagi jumlah panti yang cukup banyak yaitu berjumlah 93 panti, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang cukup agar pelaksanaan pengawasan dapat terlaksana dengan maksimal dan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Jika melihat pengawasan yang dilakukan oleh dinas sosial dari sudut pandang manajemen yang mana menurut Ermaya Suradinata manajemen adalah:

"kemampuan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan manusia dan berbagai sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara seefisien mungkin"

Maka dari definisi tersebut kita dapat melihat sumber daya manusia merupakan bagian yang penting untuk mencapai tujuan yang sudah di rencanakan. Oleh sebab itu, jika dinas sosial ingin kegiatan pengawasan dapat terlaksana dengan baik, maka dinas sosial harus menambah sumber daya manusia yang berpengalaman dan juga di imbangi dengan sumber daya materi yang baik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun untuk pembiayaan atau Sumber Daya Materi, Dinas Sosial memiliki anggaran yang cukup besar untuk membiaya operasional pengawasan, seperti yang tertuang di dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2017, yang mana anggaran yang diajukan untuk membiayai pengawasan ataupun monitoring kegiatan Dinas Sosial berjumlah Rp 920.000.000, dengan anggaran yang cukup besar seharusnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dapat berjalan secara maksimal.

E. Hambatan Yang Dihadapi Dinas Sosial Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru

Dari observasi yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia yang dalam hal ini pegawai seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia yang mana jumlah pegawai Pelaksana Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usiahanya berjumlah 5 (lima) orang. Hal ini tentu sangat menghambat proses pengawasan, karena dengan kondisi wilayah geografis provinsi riau yang cukup luas yaitu 88.672,67 Km^2, dan juga memiliki jumlah panti yang cukup banyak yaitu berjumlah 93 panti, maka diperlukan penambahan pegawai terkhususnya di bidang rehabilitasi sosial dan lanjut usia.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari responden terhadap seluruh indikator Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial di Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial di Kota Pekanbaru dimana dari masing-masing indikator didapat nilai tertinggi yaitu 67% pada indikator Baik**.** Dari hasil tersebut maka dapat di simpulkan bahwa Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Riau sudah **Berperan** Dalam Melakukan Pengawasan Panti Sosial di Kota Pekanbaru**.**
2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia yang dalam hal ini pegawai seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia yang mana pegawai Pelaksana Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia hanya berjumlah 5 (lima) orang. Hal ini tentu sangat menghambat proses pengawasan, karena dengan kondisi wilayah geografis provinsi riau yang cukup luas yaitu 88.672,67 Km^2, dan juga memiliki jumlah panti yang cukup banyak yaitu berjumlah 93 panti, maka

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diperlukan penambahan pegawai terkhususnya di bidang rehabilitasi sosial dan lanjut usia.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari penulis mengenai Peranan Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengawasan Panti Sosial Di Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Dinas Sosial untuk membuat aturan khusus tentang standar yang harus dimiliki panti sosial dengan menyesuaikan dan mengkaji kondisi wilayah dan kebutuhan yang harus di miliki panti sosial tersebut.
2. Disarankan kepada Dinas sosial untuk menambah dan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang dimilikinya agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara maksimal.
3. Disarankan kepada Dinas sosial untuk lebih meng-update data-data terbaru panti sosial sehingga nantinya dapat mempermudah petugas untuk melakukan pengawasan.
4. Disarankan kepada masyarakat untuk lebih berperan aktif membantu Dinas Sosial dalam mengawasi panti sosial yang ada di lingkungan mereka.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Awang, Azam. 2011. *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia.* Pekanbaru: ALAF RIAU

Adisasmita, 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat0Daerah).* Bogor: Ghalia Indonesia.

Dinas Sosial. 2017. *Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)& PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) Dinas Sosial Provinsi Riau.*

Fathoni, Abdurrahmat. 2009. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

Hamdi, Mukhlis 2006. *Memahami ilmu pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Huda, Ni'matul, 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Indrawijaya, Ibrahim, Adam. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi.* Bandung: PT Refika Aditama.

Kartono, Kartini. 2014. *Pemimpin dan Kepemimpinan.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Kansil, Christine, 2007. *Ilmu Negara.*Jakarta:PT. Pradnya Paramita

Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintrahan.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Ndaraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan.*Jakarta:PT. Rineka Cipta.

. 2003. *kybernology jilid 1*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Munaf, Yusri.2016. *Hukum Adminstrasi Negara Ilmu Sosial dan Politik.* Pekanbaru,Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Syafhendri. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan.* Pekanbaru

Sedarmayanti. 2011. *Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan Serta Meningkatkan Kinerja Untuk Meraih Keberhasilan.* Bandung: PT. Refika Aditama

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta: Raja Grafindo

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen.* Bandung, Mandar Maju.

Syafiie, Kencana, Inu. 2013. *Ilmu Pemerintahan.* Jakarta: PT Bumi Aksara

. 2011.*Manajemen Pemerintahan*.Jakarta: PT. Perca

. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan,* Bandung: PT. Refika Aditama

.2011. *Etika Pemerintahan.* Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.

Siagian, Sondang P. 2007.*Fungsi-Fungsi Manajerial*.Jakarta

Tanjung, Rusli, Amries. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Stratejik.* Pekanbaru: UR Press

Terry, George R. dan Leslie W. Rue, 2005.*Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

.2006. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Dokumentasi:

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun anggaran 2017.

Peraturan Gubernur Riau No 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :